





## **LAPORAN HASIL STUDI LAPANGAN**

Potensi Ekonomi Pernikahan di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara

> Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

# **Daftar Isi**

Ringkasan	3
Latar Belakang	4
Tujuan dan Pertanyaan Penelitian	6
Metode Penelitian	7
Temuan Lapangan	8
Adat	8
Sosial-ekonomi	
Komunalitas	26
Potensi Ekonomi Pernikahan	36
Faktor-Faktor Penentu Biaya Pernikahan	37
Pendapatan	37
Prestise Sosial	38
Penggunaan Prosesi Adat	39
Sumber Pembiayaan Utama	40
Kelompok Potensial	40
Potensi Produk Perbankan	41
Referensi	43
Lampiran 1. Instrumen Penelitian	44
Lampiran 2. Matriks Variabel Penelitian	46
Lampiran 3. Poster Hasil Riset Pernikahan	47

# Ringkasan

Studi tentang perkawinan di enam provinsi ini bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi perkawinan. Studi ini menemukan bahwa perkawinan di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Estimasi nilai ekonomi kegiatan perkawinan mencapai puluhan hingga ratusan milyar per tahun di setiap lokasi penelitian.

Meskipun demikian, jumlah biaya yang ditelan dalam setiap pernikahan sangat bervariasi. Tinggi rendahnya kebutuhan pembiayaan perkawinan dipengaruhi oleh pendapatan, prestise sosial, prosesi/tahapan adat yang diikuti, dan sumber pendanaan pernikahan. Dari pemetaan atas empat faktor tersebut, penelitian ini melihat peluang yang cukup terbuka untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang memiliki prestise sosial dan standar prosesi adat yang tinggi, namun memiliki pendapatan dan sumber pembiayaan yang rendah. Lembaga pendanaan seperti BRI dapat meluncurkan produk keuangan seperti tabungan dan kredit yang dapat membantu membiayai kegiatan perkawinan sesuai dengan kelompok target yang dipetakan dalam studi ini.

Selain laporan naratif, studi ini telah menghasilkan video pendek berisi temuan-temuan utama dalam studi. Sebagai salah satu produk yang dihasilkan dari penelitian, video yang sudah diserahkan ke BRI dapat dimanfaatkan untuk kepentingan diseminasi informasi.

## **Latar Belakang**

Sebagai sebuah fenomena sosial, pernikahan di Indonesia lebih banyak dikaji dari perspektif kultur dan adat istiadat karena sifatnya yang kompleks (Allerton, 2004; Fraser, 2011; Roibin, 2015; Schrauwers, 2000). Tidak seperti studi-studi sosial-kultural yang utamanya ditujukan untuk menggali makna dalam berbagai ritual dan prosesi pernikahan, penelitian ini menempatkan perkawinan sebagai fenomena sosial-kultural yang memiliki konsekuensi pada dimensi ekonomi. Sehingga, telaah atas aspek kultural dan praktik keagamaan yang mewarnai pernikahan dilakukan untuk menjelaskan satu isu yang jarang disentuh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu potensi ekonomi yang ada dalam pernikahan.

Di satu sisi, pernikahan merupakan perstiwa sosial yang tidak hanya melibatkan dua keluarga mempelai, namun juga komunitas di sekitar kedua keluarga tersebut. Artinya ada mobilisasi keterlibatan banyak orang yang bersifat sukarela dalam prosesi pernikahan. Di sisi lain, ekspresi budaya setiap kelompok masyarakat dalam pernikahan sebagai sebuah peristiwa kultural pun beragam. Ekspresi budaya ini berpengaruh pada panjang-pendeknya tahapan dan prosesi sebuah pernikahan yang pada gilirannya berhubungan dengan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pernikahan. Selain dimensi sosial, kultural dan ekonomi, pernikahan juga menjadi bagian dari peristiwa kependudukan yang idealnya dicatat sebagai bagian dari tertib administrasi.

Secara sederhana institusi pernikahan pada level praktis bekerja dalam tiga lokus yang saling berkait kelindan, yaitu: negara, adat, dan agama. Hampir semua pernikahan di Indonesia memiliki penanda kultural yang dapat membedakan pernikahan dalam satu adat dengan pernikahan di adat yang lain. Selain itu, pengaruh ajaran agama terhadap prosesi dan tahapan pernikahan di berbagai daerah juga tidak dapat dilupakan. Terlepas dari variasi kultur dan ritual keagamaan, pencatatan pernikahan di Indonesia untuk kepentingan administrasi kependudukan juga berlangsung secara beragam di banyak daerah. Sehingga tiga dimensi yang melibatkan adat, agama, dan negara akan dikaji dalam penelitian ini untuk dapat menjelaskan potensi ekonomi yang ada dalam pernikahan di Indonesia.

Guna menangkap variasi ekspresi budaya dan ritual keagamaan yang mempengaruhi pernikahan, penelitian ini memilih enam provinsi sebagai lokasi penelitian yang tersebar di daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. Dua provinsi yang mewakili lokasi penelitian di daerah barat Indonesia adalah Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Sementara dua provinsi yang ditempatkan sebagai wakil dari Indonesia tengah adalah Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian dua provinsi yang dipilih untuk mewakili daerah Indonesia di bagian timur adalah Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Selain variasi lokasi geografis, provinsi-provinsi tersebut dipilih setelah memperhatikan keragaman budaya dan agama yang ada sebagai dua faktor yang mempengaruhi ritual dan prosesi pernikahan di masing-masing daerah. Misalnya, selain daerah yang memiliki kultur matrilineal, Sumatera Barat dipilih karena kuatnya pengaruh agama Islam di tengah masyarakat Minang. Sementara Kalimantan Barat dipilih karena mewakili heterogenitas masyarakat Kalimantan yang selain diisi oleh masyarakat Melayu juga memiliki kelompok adat Dayak dan pendatang keturunan Tionghoa.

Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena mewakili budaya Mataram yang merupakan salah satu sub-kultur Jawa yang paling dominan di Indonesia. Walau tentu saja budaya pernikahan di pulau Jawa sendiri sesungguhnya sangat bervariasi. Selain DIY, Nusa Tenggara Timur dipilih untuk menambah variasi budaya di daerah tengah Indonesia karena latar belakang agama Katolik yang relatif besar di provinsi ini.

Untuk mewakili daerah timur Indonesia, penelitian ini memilih Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili masyarakat Muslim yang tinggal di daerah pesisir pantai dan Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu provinsi yang moyoritas penduduknya beragama Kristen sekaligus provinsi dengan salah satu kota paling kosmopolitan di Indonesia Timur. Walau, sekali lagi, pilihan-pilihan ini tidak merepresentasikan situasi di barat, tengah dan timur Indonesia secara lengkap, namun pilihan-pilihan lokasi penelitian dapat memberi indikasi tentang keberagaman dan variasi data yang mampu meningkatkan kualitas hasil penelitian.

Selain variasi budaya dan keagamaan, tidak dapat dipungkiri bila pernikahan di Indonesia dijalankan dalam berbagai bentuk dan cara. Dari mulai pernikahan sederhana yang hanya melibatkan keluarga inti atau sahabat dekat hingga pernikahan besar-besaran dimana tuan rumah memberikan barang mewah sebagai souvenir pernikahan untuk para tamu. Besar kecilnya biaya pernikahan di Indonesia pada umumnya berbanding lurus dengan status sosial ekonomi mempelai atau keduaorangtua mempelai (Nilan, 2008). Oleh karena itu, selain faktor kultural dan keagamaan, studi ini juga memperhitungkan faktor latar belakang sosial ekonomi mempelai dan keluarga. Bisa jadi dalam kultur adat dan kepercayaan yang sama ditemukan banyak sekali variasi biaya pernikahan. Barangkali selain latar belakang sosial ekonomi, posisi geografis masyarakat yang dapat dibagi secara umum menjadi daerah perkotaan (urban) dan daerah pedesaan (rural) juga berguna untuk menjelaskan variasi biaya pernikahan selain soal kemampuan finansial dan status sosial.

## **Tujuan dan Pertanyaan Penelitian**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan potensi ekonomi dari pernikahan yang ada di Indonesia. Potensi ekonomi ini penting untuk dipetakan karena selama ini pernikahan lebih banyak dikelola secara privat atau secara komunal oleh masyarakat dan potensi ekonominya kurang diperhitungkan. Jadi, belum ada instrumen keuangan atau produk perbankan yang secara khusus memfasilitasi kegiatan pernikahan yang dilaksanakan di tengah masyarakat. Harapannya dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada dalam pernikahan di berbagai daerah di Indonesia, institusi penyedia jasa keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat menjajaki lebih lanjut peluang dan tantangan yang ada untuk mengembangkan produk keuangan bagi kegiatan seperti pernikahan.

Selain kepentingan praktis, memetakan potensi ekonomi perkawinan juga bermanfaat untuk melihat variasi praktik pernikahan di berbagai kelompok masyarakat. Variasi pelaksanaan pernikahan bila ditinjau dari tiga variabel besar yaitu latar belakang agama, kultur, dan status sosial ekonomi masyarakat, akan bermanfaat untuk memetakan peluang dan tantangan yang ada untuk mengembangkan perekonomian di suatu daerah.

Ada tiga pertanyaan besar dan beberapa pertanyaan turunan yang dijawab dalam penelitian ini. Tiga pertanyaan besar mewakili tujuan studi untuk menggali potensi ekonomi pernikahan di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi besar/kecilnya biaya pernikahan di Indonesia, dan peluang pengembangan produk perbankan untuk pembiayaan pernikahan.

- 1. Berapakah potensi/nilai ekonomi pernikahan di masing-masing lokasi studi?
- 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya biaya pernikahan di lokasi studi?
  - a. Bagaimana pengaruh tahap-tahapan pernikahan dan ritual adat di tiap daerah terhadap biaya pernikahan?
  - b. Bagaimana pengaruh kemeriahan pesta pernikahan di tiap daerah terhadap biaya pernikahan?
- 3. Apa saja produk perbankan yang bisa dikembangkan untuk menangkap potensi ekonomi pernikahan?
  - a. Apa produk perbankan yang dapat dikembangkan dan tidak mengganggu kapasitas kolektif masyarakat dalam mengelola biaya pernikahan?
  - b. Siapa yang dapat diajak bekerjasama untuk mengembangkan produk ini?

## **Metode Penelitian**

Studi ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan pakar di bidang politik dan pemerintahan, pakar ekonomi perbankan, dan pakar antropologi budaya dari Universitas Gadjah Mada. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu tersebut duduk bersama di awal penelitian untuk menyusun desain penelitian dengan metode kualitatif. Termasuk dalam tugas para pakar adalah menyusun pertanyaan kunci dan secara umum mendesain metode penelitian yang akan dilaksanakan.

Selain itu, tim ahli juga menyusun instrumen penelitian berupa *interview guide* dan mengidentifikasi target responden potensial, serta memilih daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi dilakukkan dengan mempertimbangkan data-data yang berkaitan dengan pernikahan dalam Survei Ekonomi Nasional serta data-data kualitatif dari studi antropologi tentang pernikahan.

Berdasarkan diskusi antara tim inti dan review atas literatur yang ada, ada beberapa responden kunci yang disasar sebagai sumber data dalam penelitian ini, yaitu: mempelai, orangtua mempelai, wedding organizer, tokoh adat, tokoh agama, salon pengantin, perusahaan katering, penyewaan gedung, penyewaan tenda dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pernikahan di tiap-tiap daerah. Dari daftar responden kunci ini kemudian dibentuk tim lapangan yang bertugas mengumpulkan data secara langsung di setiap daerah. Untuk memastikan konsistensi antara penelitian lapangan di satu daerah dengan daerah lain, maka diadakan satu workshop bagi seluruh peneliti yang akan mengumpulan data di lapangan.

Metode pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan *focus group discussion* (FGD). Setiap tim terdiri dari dua hingga tiga orang peneliti yang mengumpulkan data ke lokasi masing-masing selama satu minggu. Setiap tim berhasil menemui responden yang relevan karena dibantu oleh informan lokal yang telah mencari mempelai, orangtua mempelai serta responden-responden yang lain.

Setelah proses pengumpulan data lapangan selesai dilakukan, semua anggota tim berbagi temuan dan analisis awal di dalam sebuah workshop. Proses analisis dilakukan dengan menggabungkan data-data kualitatif yang didapat dengan teknik *content analysis* dan data-data kuantitatif dengan perhitungan matematika sederhana. Workshop ini menghasilkan temuan-temuan utama dan rekomendasi sesuai dengan tujuan penelitian.

## Temuan Lapangan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, sejumlah peneliti melakukan pengumpulan data lapangan. Setiap tim terdiri dari masing-masing tiga orang dan mengumpulkan data selama tujuh hari. Di lapangan tim peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan mengumpulkan data sekunder. Setelah pengumpulan data lapangan, seluruh tim peneliti duduk bersama untuk membahas temuan dari lapangan.

Dalam workshop temuan lapangan, tim peneliti melihat ada tiga tema besar yang berguna untuk memetakan potensi ekonomi pernikahan yaitu: adat istiadat, parameter sosial-ekonomi, dan komunalitas dalam masyarakat.

#### Adat

Penelitian ini menemukan bahwa adat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan banyak aspek dalam sebuah pernikahan. Catatan ini akan menjelaskan bagaimana adat turut mempengaruhi biaya pernikahan di semua area studi. Secara umum ditemukan bahwa semakin panjang, semakin detail, dan semakin meriah prosesi adat yang dilalui, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah pernikahan. Sehingga, mengenali semua tahapan-tahapan prosesi pernikahan menurut adat menjadi krusial. Tentu saja setiap daerah memiliki kompleksitas serta tahapan prosesi pernikahan yang berbeda-beda. Namun, secara umum prosesi adat di semua daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap besar, yaitu: tahap pra pernikahan, tahap peresmian pernikahan, dan tahap paska pernikahan.

#### Tahap 1. Pra Pernikahan

Tahap pra nikah merupakan fase paling awal untuk calon pengantin saling mengenal lebih lanjut dan bertemu dengan kedua belah pihak keluarga. Fase ini menjadi bagian penting dalam proses sebelum memutuskan untuk menikah karena memiliki sejumlah fungsi, diantaranya yaitu: pertama, untuk menemukenali dan memastikan kualitas latar belakang calon pengantin dan keluarganya melalui "bibit (asal usul atau garis keturunan), bebet (penampilan), dan bobot-nya (kualitas diri)". Dalam tradisi masyarakat Bugis proses penilaian latar belakang calon pengantin disebut matiroh. Tujuan kedua pertemuan keluarga sebelum menikah adalah mengantisipasi bila ditemukan ketidakcocokan antara calon pengantin dan (atau) keluarga untuk dimusyawarahkan dan dicari jalan keluarnya. Ketiga, untuk membantu calon pengantin memahami dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan

dengan pernikahan termasuk membicarakan jumlah uang yang harus diberikan kepada keluarga calon besan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam tahap ini. Masyarakat Minangkabau perantauan memiliki keunikan pada saat dalam bentuk babaluak tando, dimana keluarga mempelai perempuan menjemput calon mempelai laki-laki (marapulai) dengan membawa sejumlah uang atau barang yang nantinya diberikan kepada marapulai. Sejumlah uang atau barang ini diberikan kepada marapulai sebagai tanda penghargaan karena sudah bersedia ikut dan tinggal di rumah keluarga perempuan. Lebih dari itu, besaran jumlah uang jemput (uang japuik) juga disesuaikan dengan kualitas diri yang dimiliki oleh marapulai, yaitu dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status dan hubungan sosial marapulai dan keluarga dengan lingkungannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan status sosialnya, maka uang japuik juga semakin mahal.

Tradisi di Sumatera Barat berbeda dengan tradisi pra pernikahan di Pontianak, Sulawesi Utara, Makassar, Sumba, dan Yogyakarta. Di daerah-daerah yang disebut belakangan, biasanya pihak keluarga laki-laki yang akan datang berkunjung ke kediaman keluarga perempuan. Sehingga keluarga laki-laki menjadi pihak yang harus menyerahkan sejumlah uang atau barang berharga lain untuk keluarga perempuan. Di Sulawesi Selatan, uang yang diserahkan disebut sebagai uang panaik, di Kalimantan Barat disebut uang asap, di Sumba selain uang juga diserahkan binatang ternak dan disebut sebagai belis, dan di Sulawesi Utara selain uang juga diserahkan barang kebutuhan rumah tangga dan disebut sebagai antar harta. Pertemuan dua keluarga yang disebut masominta dalam tradisi Minahasa dapat dilakukan hingga beberapa kali tergantung dengan kebutuhan kedua belah pihak. Di Sumba juga hampir serupa dimana segala prosesi adat pra-nikah ini bisa sangat lama sampai tercapai kesepakatan kedua belah pihak terkait dengan belis. Selain belis, pihak laki-laki juga memberikan mamoli emas (kalung dengan liontin berbentuk mamoli), dan parang sebagai alas bicara. Dalam tradisi Sumba, bukan hanya pihak laki-laki saja yang memberikan belis, namun pihak perempuan wajib memberikan balasan sebagai alas bicara setiap kali ada persetujuan dari pihak perempuan. Balasan dari pihak perempuan tersebut biasanya berupa kain sarung (tenun). Di Yogyakarta, tahap ini biasanya disebut dengan nontoni. Setelah nontoni, pihak keluarga pria datang kembali ke rumah pihak perempuan dengan maksud untuk melamar. Pada tahap ini biasanya disaksikan oleh pihak ketiga yang berasal dari para sesepuh di lingkungan tempat tinggal dan memberikan pasok tukon (pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin perempuan sebagai pengganti tanggungjawab orangtua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin perempuan); peningset (sebagai tanda pengikat dari orang tua pihak pengantin pria ke pihak calon pengantin perempuan, biasanya ditandai dengan tukar cincin); dan serahserahan (pemberian hadiah dari pihak laki-laki ke pihak perempuan berupa perlengkapan yang kelak dapat digunakan setelah menikah).

Hal lain yang biasanya dipersiapkan oleh generasi muda yang ada di Kota Yogyakarta (dan juga di beberapa daerah kota besar lainnya), yaitu adanya perayaan *bride to be* atau yang lebih dikenal dengan "Bridal Shower". Acara ini biasanya direncanakan oleh para sahabat dekat dari calon pengantin perempuan sebagai sebuah surprise sebelum calon pengantin perempuan melepas masa lanjangnya. Acara ini sangat digemari di kalangan oleh anak muda yang gemar mengekspresikan diri di media sosial. Biaya yang dikeluarkan biasanya berasal dari para sahabat calon pengantin perempuan sebagai bentuk hadiah kepada calon pengantin yang akan segera mengakhiri masa lajangnya. Tempat acaranya pun biasanya dilaksanakan di café, rumah makan/ resto, maupun hotel dengan kisaran budget 200.000 – 350.000 per orang.

Dari keenam daerah tersebut, terdapat beberapa kesamaan prosesi di tahap pra nikah yang biasanya selalu ditemui, yaitu: pertama, pertemuan antara kedua keluarga calon mempelai untuk membicarakan berbagai hal. Pihak keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan. Kedua, lamaran atau disebut *mapatuada* di Sulawesi Selatan dan disebut *verloof* di Sulawesi Utara yang juga menjadi salah satu kegiatan tersendiri. Pertunangan dilaksanakan dengan tujuan untuk menandai kesepakatan yang telah mengikat antara kedua belah pasangan dan keluarganya. Tanda pengikat ini biasanya diwujudkan dalam bentuk cincin atau bagi keturunan Tionghoa biasanya berupa kalung serta hantaran untuk mempelai perempuan baik berupa perhiasan, kosmetik, pakaian, sandal, tempat tidur, dan lain sebagainya.

Besaran biaya yang dipersiapkan pada tahap pra nikah ini cukup bervariasi namun biasanya jumlah uang yang diberikan dari satu keluarga ke keluarga calon besan (uang panaik, belis, uang japuik, uang asap, antar harta, dan hantaran) menjadi penanda kemeriahan pesta dan status sosial keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam tradisi Bugis, Minahasa, Melayu, Dayak, Tionghoa, keluarga laki-laki mesti merogoh kocek mulai dari puluhan hingga ratusan juta untuk diberikan kepada keluarga perempuan. Sementara dalam tradisi Minangkabau perantauan, keluarga perempuan biasanya juga mengeluarkan uang dan menyerahkan barang dalam kisaran puluhan hingga ratusan juta.

#### Tahap 2. Peresmian Pernikahan

Setelah melewati tahapan pra nikah, tahap selanjutnya adalah acara inti, yaitu meresmikan pernikahan baik secara adat, agama, maupun negara. Di enam daerah ditemukan bahwa menjalankan prosesi adat dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang mutlak. Namun, tingkat kepatuhan untuk menjalankan prosesi adat secara menyeluruh berbeda beda tiap daerah. Di beberapa daerah yang masih memegang teguh adat dan tradisi, menikah secara adat sudah menjadi tanda bahwa pernikahan tersebut adalah sah di mata masyarakat, misalnya di Sumba. Sehingga, menikah secara agama ataupun mencatatkan pernikahan ke Kantor Catatan Sipil adalah hal yang sekunder. Dengan demikian mutlak bagi masyarakat Sumba bahwa pernikahan yang dilakukan di gereja maupun di catatan sipil dianggap tidak sah apabila belum melaksanakan pernikahan adat.

Akan tetapi di daerah seperti Yogyakarta, Manado, dan Sulawesi Selatan pernikahan adalah sah apabila dilegalkan secara agama dan Negara, sedangkan adat adalah hal yang sekunder sehingga istilah menikah secara adat sudah mengalami pergeseran hanya sebagai prosesi/ritual. Bagi masyarakat ini menikah agama dan Negara adalah yang utama sesuai dengan UU Perkawinan, maka setelah melangksungkan pernikahan agama dan agar memperoleh pengakuan dari negara, maka sepasang pengantin juga harus mencatatkan pernikahannya di hadapan negara.

Dari segi pembiayaan, tentunya pernikahan adat juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pernikahan adat biasanya menelan biaya yang lebih besar karena adanya prosesi adat yang panjang serta keterlibatan banyak orang. Hal inilah yang membuat biaya pernikahan semakin besar. Di Kalimantan Barat misalnya, prosesi pernikahan suku Dayak Kristen membutuhkan biaya sekitar 20 – 50 juta. Sedangkan di Sumba, pernikahan adat dengan belis sebagai barang hantarannya jika dirupiahkan bisa menelan biaya dari puluhan hingga ratusan juta lebih. Sebagai contoh, bagi kalangan masyarakat yang berasal dari stratifikasi sosial kelas bangsawan (Maramba) kaya di Sumba, hantaran belis yang berupa hewan ternak jika dirupiahkan bisa mencapai satu miliar rupiah. Sedangkan untuk pernikahan agama dan Negara (baik KUA maupun mencatatakan pernikahan di Catatan Sipil), tidak terlalu memerlukan biaya yang besar.

#### Tahap 3: Paska Nikah

Setelah tahap peresmian pernikahan, tahap pasca nikah ditandai dengan diselenggaran pesta pernikahan. Pada tahap ini, mempelai dan kedua orangtua mempelai biasanya mengadakan

acara pesta pernikahan atau yang lebih dikenal dengan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan menjadi acara paling akhir yang diselenggarakan dan waktu pelaksanaannya pun tidak terikat. Artinya, dapat dilangsungkan di hari yang sama dengan waktu pernikahan adat, agama, dan negara ataupun dapat dilangsungkan di hari berikutnya bahkan bulan atau tahun berikutnya. Catatan khusus diberikan pada masyarakat Sumba dimana paska peresmian pernikahan, maka tahapan selanjutnya adalah pemindahan mempelai perempuan dari rumah orangtuanya ke rumah calon suami (jika sudah ada) atau ke rumah orangtua laki-laki. Penyelenggaraan pesta pernikahan biasanya dilakukan setelah melalui tahap pemindahan tersebut.

Resepsi pernikahan yang diselenggarakan ini menjadi wujud ucapan syukur dan terima kasih serta menjadi perayaan bersama atas terlaksananya seluruh prosesi pernikahan yang telah dilewati dengan lancar. Pada acara ini, biasanya tamu undangan jauh lebih banyak jumlahnya karena turut diramaikan oleh orang-orang terkasih yang berasal dari kerabat dekat, teman, tetangga, mitra kerja, dan lain sebagainya. Untuk merayakannya, pilihan tempat juga menjadi bahan pertimbangan karena menyesuaikan jumlah tamu undangan. Biasanya, jika tamu yang diundang tidak terlalu banyak, maka acara akan dilaksanakan di rumah ataupun di rumah makan/ restoran; sedangkan jika tamu undangan jumlahnya banyak, maka pilihannya adalah menyewa gedung ataupun hotel yang dapat menampung lebih banyak tamu undangan meskipun terbatas pada jam pelaksanaannya. Di daerah yang masih pedesaan biasanya pesta pernikahan dilakukan di rumah (jarang diselenggarakan di gedung atau restoran). Sedangkan untuk daerah urban, pesta pernikahan sudah lazim dilakukan tidak di rumah, dan menyewa Event Organizer.

Dalam konteks resepsi pernikahan di Yogyakarta, mengadakan pesta dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, berbagi kebahagiaan, menunjukkan eksistensi dir dan status sosial, serta menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu, biasanya pesta pernikahan dilaksanakan oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Lazimnya biayanya ditanggung oleh pihak keluarga perempuan yang mengandung makna bahwa tugas akhir dari kedua orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak perempuannya telah usai dan dipestakan melalui pernikahan. Dengan demikian, pihak keluarga mempelai perempuan memiliki hak untuk menentukan adat mana yang akan digunakan dalam resepsi tersebut. Selanjutnya, apabila pihak keluarga mempelai laki-laki ingin adatnya digunakan, mereka juga dapat mengadakan resepsi tambahan tersendiri dengan biaya dari pihak keluarga laki-laki dengan acara resepsi yang lazimnya disebut dengan 'Ngunduh Mantu'.

Selain itu, pesta pernikahan bagi masyarakat perkotaan di Yogyakarta, pemiilihan konsep resepsi pernikahan juga dipengaruhi oleh trend gaya pernikahan ala Barat yang kini menjadi salah satu konsep pesta pernikahan yang baru di kalangan millennial. Konsep resepsi pernikahan dibuat seminimalisir dan dengan jumlah tamu undangan yang berasal dari keluarga dan kerabat terdekat pihak kedua mempelai, dengan kisaran tidak lebih dari 100 tamu undangan. Tujuannya, agar lebih intimate dengan tamu undangan. Di kalangan generasi ini, biasanya konsep ini dikenal dengan "after party".

Hal ini tentu berbeda dengan tradisi darek dan tradisi rantau, Padang, Sumatera Barat dimana dalam tradisi darek, pesta pernikahan menjadi keputusan keluarga. Dengan demikian, pembiayaannya pun menjadi tanggungjawab dan kewajiban orangtua. Biaya yang dibutuhkan berkisar 30 - 50 juta karena biasanya keluarga akan mengadakan pesta pernikahan di halaman rumah dan jarang yang menggunakan gedung. Untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, biasanya sumber pembiayaan diperoleh dari tabungan orang tua, pinjaman keluarga, pinaman ke bank, maupun menjual taanah warisan. Sedangkan dalam tradisi rantau, pesta pernikahan merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi sebuah keharusan dan dapat menghasilkan uang yang lebih besar yang diperoleh dar sumbangan. Untuk melaksanakan pesta pernkahan ini, biasanya pembiayaan menjadi tanggung jawab orangtua dan mamak satu kampung. Kisaran biaya yang diperlukan sekitar 50 - 100 juta. Untuk mencukupi biaya pernikahan, biasanya berasal dari tabungan orang tua, iuran bersama mamak satu kampung, uang bandocek, dan terkadang meminjam ke BUMDesa. Di Sumba, kisaran resepsi pernikahan juga bervariasi tergantung pada stratifikasi sosial dan kelas sosialnya. Dalam tradisi Sumba untuk pesta nikah dikenal istilah uang bumbu (untuk biaya resepsi), yang biasanya ditanggung oleh mempelai laki-laki.

Berdasarkan hasil temuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekhasan prosesi pernikahan dari masing-masing daerah tersebut menunjukkan miniaturnya Indonesia. Praktik pernikahan adat yang dijumpai di masing-masing daerah tersebut menggambarkan masih terawatnya tradisi adat istiadat yang ditunjukkan dengan kekhasan prosesi pernikahan adat yang dilalui. Meskipun dalam perkembangannya, pilihan untuk menggunakan adat ataupun tanpa adat telah dimodifikasi dalam praktik pernikahan. Hal ini tentunya juga menjadi bahan pertimbangan utama bagi pasangan mempelai beserta pihak kedua mempelai untuk memilih dan memutuskan tanpa mengesampingkan maupun mengurangi nilai-nilai kesakralan dalam sebuah pernikahan.

Terlebih saat ini, karena tingginya mobilitas seseorang sangat dimungkinkan percampuran dua budaya bahkan lebih, sehingga dimungkinkan pula terjadinya akulturasi budaya dalam menentukan penggunaan prosesi pernikahan adat. Adapun besar kecilnya keseluruhan biaya yang digunakan untuk menjalani keseluruhan rangkaian proses mulai dari tahapan pra nikah, nikah, dan juga paska nikah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan konsep acara yang akan digunakan sehingga sumber pembiayaan dapat menjadi tanggungjawab dari pasangan, kedua keluarga, maupun sanak saudara.

Mekanisme pembiayaannya pun juga beragam, yaitu pembiayaan murni berasal dari kedua orang tua mempelai perempuan (misalnya di Yogyakarta), ada pula yang patungan, campuran dari kedua mempelai perempuan dan laki-laki, ada juga yang ditanggung oleh jaringan kekerabatan/sanak keluarga(misal: Sumba dan Sumatera Barat), kredit perbankan, dan bahkan ada juga yang ditanggung oleh pasangan mempelai tersebut (misalnya generasi muda yang sukses). Dalam masyarakat Sumba dan Sumatera Barat, biaya pernikahan ditanggung bersama sanak keluarga (suku/jaringan kekerabatan) karena pernikahan dalam masyarakat tersebut merupakan sebuah peristiwa sosial.

#### Ketaatan masyarakat pada prosesi adat

Terlepas dari prosesi adat pernikahan yang relatif panjang dan kompleks, tidak dapat dipungkiri bahwa ketaatan masyarakat untuk mengikuti setiap prosesi adat pernikahan pun beragam. Paling tidak ada tiga aspek yang dapat digunakan untuk menakar kepatuhan masyarakat dalam menjalankan prosesi adat di sebuah pernikahan, yaitu: struktur sosial masyarakat setempat, letak geografis tempat berlangsungnya pernikahan, dan faktor *prestise* penyelenggara pernikahan. Struktur sosial masyarakat dimaknai sebagai konfigurasi relasi antar kelompok masyarakat yang dapat dibagi menjadi dua kategori besar: hierarkis dan egaliter. Sementara letak geografis juga dibagi menjadi dua yaitu daerah urban dan daerah rural. Kemudian *prestise* merujuk pada keinginan pemilik hajat untuk menyajikan acara pernikahan sebaik mungkin demi gengsi keluarga.

Dalam studi ini, struktur sosial masyarakat dianggap hierarkis apabila masyarakat terdiri dari beberapa kelompok masyarakat yang bertingkat. Ini dapat ditemui di Sumba yang mengenal beberapa strata seperti Raja, Maramba, orang biasa, dan Ata-hamba. Masyarakat yang hierarkis juga ditemui di Yogyakarta dan Sulawesi Selatan yang membedakan status sosial antara keturunan bangsawan dan masyarakat biasa. Selain hierarki yang bersifat tradisional, sebuah masyarakat juga dikategorikan dalam kelompok yang hierarkis bila ada pemimpin

adat yang menentukan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan prosesi pernikahan. Ini ditemukan di Minangkabau dimana sebagian besar prosesi adat dilaksanakan atas arahan dan aturan dari *ninik mamak*. Pengumpulan data di lapangan menemukan bahwa secara umum, masyarakat yang hierarkis relatif lebih taat dalam menjalankan prosesi adat pernikahan. Kelompok yang memiliki *privillage* di tengah masyarakat yang hierarkis cenderung menyajikan prosesi adat dalam pernikahan dengan sesempurna mungkin sebagai sebuah cara untuk mendemonstrasikan keunggulan –sekaligus meneguhkan posisi mereka, di tengah masyarakat. Sementara kelompok yang tidak memiliki *privillage*, menggunakan prosesi adat dalam pernikahan mereka sebagai bagian dari ekspresi atau upaya untuk melakukan mobilisasi vertikal ke atas.

Bila masyarakat hierarkis cenderung taat dalam mengikuti prosesi adat, kecenderungan yang sebaliknya ditemukan di tengah masyarakat yang egaliter seperti di Minahasa dan di Kalimantan Barat. Di tengah absennya hierarki dan pemimpin adat yang tidak memiliki posisi khusus dalam prosesi pernikahan, maka mengikuti seluruh prosesi adat secara ketat tidak lagi menjadi sebuah kecenderungan umum. Bukan berarti adat sama sekali tidak berlaku atau tidak diikuti di Minahasa dan di Kalimantan Barat, namun secara umum warga di dua daerah ini cenderung tidak melaksanakan seluruh prosesi adat secara detail dan runtut. Sementara di dalam budaya Dayak, aplikasi adat dalam pernikahan bersifat sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, misalnya dengan mengganti babi dengan ayam sebagai hidangan. Tidak seperti masyarakat yang hierarkis, prosesi adat dalam masyarakat yang egaliter tidak digunakan untuk meneguhkan posisi sosial kelompok tertentu di dalam masyarakat. Tokoh adat yang tidak memiliki posisi khusus dalam acara pernikahan juga membuat masyarakat mengabaikan prosesi yang bersifat turun temurun.

Selain struktur sosial masyarakat, letak geografis tempat pelaksanaan pernikahan juga berpengaruh pada panjang, meriah, dan komplitnya prosesi adat dalam sebuah perkawinan. Masyarakat yang tinggal di daerah urban atau perkotaan cenderung menyederhanakan penggunaan prosesi adat dalam pernikahan mereka. Kecenderungan ini dapat dijelaskan dengan situasi masyarakat perkotaan yang lebih sedikit memiliki waktu luang dan rendahnya kohesivitas sosial yang ada. Sementara masyarakat di daerah pedesaan yang masih erat kekerabatannya dan dapat meluangkan waktu untuk melaksanakan prosesi adat, cenderung berupaya untuk menjalankan tahapan-tahapan pernikahan berdasarkan adat sebaik mungkin.

Bila struktur sosial dan letak geografis dipadukan, akan ditemukan empat kelompok dalam masyarakat yang dapat diperkirakan ketaatannya terhadap prosesi adat (lihat tabel 1).

Kelompok masyarakat yang paling tinggi ketaatannya pada prosesi adat adalah kelompok masyarakat yang hierarkis dan tinggal di daerah pedesaan. Sementara kelompok masyarakat yang egaliter dan tinggal di daerah perkotaan adalah kelompok masyarakat yang paling rendah kepatuhannya dalam mengikuti prosesi adat. Dua kelompok masyarakat yang lain, yaitu kelompok hierarkis-urban dan kelompok egaliter-rural, dapat dikatakan menggunakan prosesi adat dalam pernikahan secara moderat. Sehingga dalam tabel dikelompokkan sebagai 'sedang'.

Table 1. Ketaatan masyarakat pada prosesi adat

		Lokasi geografis tempat tinggal	
		Urban	Rural
Struktur sosial	Hierarkis	<b>Sedang</b> Bukittinggi (Sumatera Barat) Kota Yogyakarta (DIY)	Tinggi Sumba (Nusa Tenggara Timur) Padang Pariaman (Sumatera Barat) Sleman dan Bantul (DIY)
masyarakat	Egaliter	Rendah Kota Manado (Sulawesi Utara) Pontianak (Kalimantan Barat)	Sedang Tondano dan Tomohon (Sulawesi Utara)

Selain faktor struktur sosial masyarakat dan faktor lokasi geografis, kepatuhan pada prosesi adat secara menyeluruh juga dipengaruhi oleh *prestise* yang ingin dibangun oleh pemilik hajat dalam acara pernikahannya. Walaupun sebuah keluarga tinggal di tengah masyarakat yang egaliter dan sudah sangat urban, namun bila orangtua ingin menggunakan pernikahan putra/putrinya sebagai momentum untuk meneguhkan kesuksesan atau keberhasilannya, maka adat menjadi institusi yang kerap dijadikan instrumen untuk mendesain sebuah pesta yang mewah dan berlangsung lama. Misalnya keluarga Minahasa yang tinggal di Kota Manado yang umumnya hanya mengikuti adat secara moderat, pada kenyataannya bisa menjalankan prosesi adat dengan rinci dan mewah karena ingin membangun sebuah *prestise* bagi keluarganya melalui prosesi pernikahan.

#### Sosial-ekonomi

Dalam semua tradisi adat yang menjadi lokasi penelitian ini, pernikahan adalah aspek penting dalam siklus kehidupan manusia yang penyelenggaraannya sendiri merupakan sebuah perayaan. Sebagai sebuah tradisi penting, rangkaian pelaksanaan pernikahan pada umumnya akan memperhatikan dua hal: (1) kesakralan institusi pernikahan, yang biasanya ditandai dengan prosesi adat dan/atau agama, (2) perayaan, atau ungkapan rasa syukur terhadap terlaksananya salah satu aspek penting dalam siklus kehidupan yang biasanya akan melibatkan tidak hanya yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat, namun juga lingkungan sosial tempat dimana keluarga dan/atau mempelai tinggal. Selain itu, dalam sebuah masyarakat dengan tradisi komunal, pernikahan adalah cara untuk menambah dan memperlebar kekerabatan. Dengan bersatunya dua individu dalam ikatan pernikahan, seluruh keluarga, kerabat, maupun suku pun ikut disatukan. Oleh karenanya, pernikahan ini tidak hanya berlangsung dalam ranah-ranah privat keluarga dan mempelai, melainkan melibatkan kerabat dan suku secara lebih luas yang dijadikan ajang untuk tetap menjaga kedekatan dan kekerabatan keluarga dan juga menunjukkan jaringan kekerabatan, posisi sosial dan status ekonomi keluarga pelaksana pernikahan pada masyarakat luas.

Dalam rangka menambah dan memperluas kekerabatan, kelas ekonomi dan posisi sosial menjadi salah satu alat ukur penting untuk menentukan kesejajaran mempelai pria terhadap mempelai wanita, begitu pula sebaliknya. Jika salah satu mempelai berada pada strata yang lebih rendah, usaha-usaha untuk menyejajarkan dilakukan dalam bentuk penyerahan harta benda dari pihak laki-laki ke pihak perempuan (bagi tradisi patriarki) dan/atau dari pihak perempuan ke pihak laki-laki (untuk tradisi matriarki). Jumlah harta yang diberikan merupakan kesepakatan antar dua keluarga yang ditentukan oleh status sosial (i.e kebangsawanan), tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, serta lingkungan pergaulan. Selain itu, Status ekonomi sangat menentukan besaran komponen-komponen pembiayaan tahapan pernikahan, baik pra, pelaksanaan, maupun pesta atau resepsi pernikahan. Kecenderungannya adalah semakin tinggi status sosial dan ekonomi salah satu mempelai dan keluarganya, maka semakin tinggi pula pembiayaan pagelaran pernikahan.

Tingginya biaya pernikahan ini memiliki konsentrasi yang berbeda-beda pada parktik di beberapa daerah, namun sebagian besar memusatkan perayaan pernikahan ini pada aspek pesta atau resepsi yang terjadi di luar prosesi agama dan adat, kecuali untuk kasus Sumba. Untuk lebih jelas melihat praktik-praktik pelaksanaan pernikahan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, kasus-kasus di enam wilayah yang mewakili adat mayoritas di wilayah tersebut dapat menjadi ilustrasi lebih detail.

#### Pernikahan Adat Minang di Sumatera Barat

Dalam dua tradisi Minang; Darek dan Rantau, pernikahan adalah kejadian bersatunya dua keluarga dari dua persukuan, oleh karena itu latar belakang masing-masing keluarga kemudian menjadi hal yang cukup penting untuk diperhitungkan. Sebagai usaha menambah dan memperluas kekerabatan, pernikahan merupakan peristiwa penting dan wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa.

Dalam tradisi matriarki, menantu laki-laki (sumando) wajib ikut dan tinggal dengan keluarga perempuan, proses ini diawali dengan proses penentuan gelar bagi menantu laki-laki yang disesuaikan dengan ilmu dan atau status sosial yang telah dimilikinya. Pemberian gelar ini disesuaikan atau paling tidak setara dengan status sosial keluarga perempuan, dimana pesta pernikahan (alek) dilaksanakan.

Dalam tradisi rantau, alek merupakan bagian terpenting dalam tradisi pernikahan dan wajib dilaksanakan. Besarnya pagelaran alek ini tidak ditentukan oleh status/gelar sosial seseorang atau keluarganya, namun perilaku seseorang dalam kehidupan sosialnyalah yang akan menjadi penentu kesuksesan pelaksanaan alek. Kewajiban melaksanakan alek berhubungan erat dengan jumlah undangan yang hadir yang akan berdampak pada uang badoncek (sumbangan dari para undangan) yang diterima. Semakin besar uang badoncek yang diterima, semakin seseorang dan keluarganya dipandang sebagai sosok yang baik dan 'pandai bersosialisasi' di lingkungan nagari-nya.

Sementara itu, dalam tradisi darek, pelaksanaan alek bukanlah kewajiban untuk dilaksanakan, karena keputusan pelaksanaan alek adalah hak prerogatif keluarga inti. Namun, karena pentingnya peristiwa pernikahan pada sebuah keluarga, umumnya pesta akan diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan. Status sosial seseorang menjadi salah satu penentu besar-kecilnya pelaksanaan alek yang dapat dilihat dari jumlah undangan yang berbanding lurus dengan luasnya pergaulan dan posisi publik seseorang dan keluarganya.

Dalam tradisi tanah rantau, status sosial sumando ini menjadi faktor dalam menentukan jumlah 'uang jemput (japuik)'. Uang japuik, yang dianggap sebagai uang untuk menghargai kesediaan sumando untuk pergi dari keluarga yang telah membesarkan dan mendidiknya, jumlahnya harus menyesuaikan dengan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

Besaran uang japuik yang telah ditentukan, akan ditanggung bersama-sama oleh keluarga besar mempelai perempuan, mamak, ninik mamak suku, dan warga se-Nagari. Tradisi 'menjapuik' ini kemudian mengalami pergeseran menjadi 'gengsi' bagi keluarga mempelai laki-laki dan juga keluarga mempelai perempuan beserta dengan keluarga besar dan ninik-mamaknya, dimana semakin besar jumlah uang japuik, maka dianggap semakin tinggi

kemampuan ekonomi keluarga perempuan sebagai pemberi, begitu juga dengan status lakilaki dan keluarganya sebagai penerima.

Tradisi uang japuik ini tidak ditemukan di wilayah darek. Pembiayaan pernikahan, khususnya untuk penyelenggaraan alek menjadi tanggungan keluarga inti. Selain dari tabungan keluarga, menjual properti hingga tanah pusako (warisan) menjadi pilihan untuk membiayai alek.

Pernikahan dalam adat sangat dipengaruhi oleh Agama Islam. Dalam tradisi darek, pelaksanaan tradisi pra-nikah dilaksanakan sesuai dengan urutan adat, namun tahapan yang paling penting dan wajib dilaksanakan adalah akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan bagi tradisi rantau, akad nikah secara islam hanyalah bagian dari keseluruhan tahapan pernikahan yang harus dilalui, namun inti dari sebuah pernikahan bagi masyarakat rantau adalah pesat/alek. Masyarakat rantau percaya bahwa sebelum alek diadakan, maka status sebuah pernikahan masih dianggap 'gantung' atau belum sah secara adat.

#### Pernikahan Adat Melayu-Dayak-Tionghoa di Kalimantan Barat

Biaya pernikahan di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan di desa (misalnya bila dibandingkan antara Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya). Upacara dan resepsi pernikahan di kota biasanya diselenggarakan di gedung atau hotel dan sebagian memakai jasa Wedding Organiser (WO). Sementara di wilayah urban, upacara dan resepsi pernikahan dilakukan di rumah dengan melibatkan keluarga besar. Meskipun demikian, keluarga yang terlibat akan mendapatkan uang sabun atau uang lelah atas kerja yang mereka lakukan seperti memasak makanan dan mencuci piring. Namun pengeluaran ini tetap lebih hemat bila dibandingkan dengan menyewa jada Wedding Organiser.

Di wilayah rural, Credit Union (CU) menjadi kompetitor bagi sektor perbankan. Masyarakat yang bekerja sebagai peladang lebih memilih menjadi anggota CU dan dapat mengakses pinjaman. Aspek krusial relasi masyarakat rural dengan CU adalah trust/kepercayaan, hal ini terkait dengan elemen pendidikan dan pemberdayaan yang juga ditawarkan oleh CU. Pemberdayaan ini terutama bagi peladang dan masyarakat adat yang punya koneksi erat dengan tanah dan hutan dan tergolong ke dalam kelas ekonomi menengah ke bawah. Bagi warga yang berasal dari kelas menengah dengan profesi PNS dan Pegawai Swasta dan tinggal di area perkotaan mengakui bahwa pilihan menabung dirasa lebih baik karena gengsi apabila

biaya pernikahan dibiayai dari mekanisme kredit. Oleh kerena itu, harapan dari mereka justru adanya skema tabungan pernikahan dari sector perbankan.

Aspek Adat, Agama, Pencatatan Sipil, serta Aspek Sosial dalam Proses Pernikahan

Terdapat 3 etnis dominan di Kalimantan Barat, yakni Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Semua etnis, akan melalui prosesi pernikahan dari sisi Adat masing-masing, kemudian dari sisi Agama, Pencatatan Sipil, serta aspek sosial (resepsi jamuan makan yang mengundang sanak saudara relasi yang lebih luas). Dari empat aspek tersebut, aspek yang menelan biaya terbesar adalah resepsi sosial dengan komponen anggaran penyediaan konsumsi. Sedangkan prosesi agama, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, maupun Buddha, tidak menelan biaya yang signifikan. Proses pencatatan sipil di KUA maupun Dukcapil pun hanya membutuhkan biaya administrasi yang terbilang sangat terjangkau oleh siapa saja.

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing latar belakang etnis:

Pertama, masyarakat Dayak. Tradisi baholak (potong babi atau ayam) menjadi prosesi wajib yang harus dijalani. Pembagian babi disesuaikan dengan posisi dalam adat. Pesta atau jamuan resepsi sosial, dilaksanakan di rumah keluarga laki-laki dan perempuan, sesuai kemampuan. Bahkan bisa dilaksanakan beberapa tahun setelah upacara adat dan memiliki uang yang cukup.

Kedua, masyarakat Melayu. Pernikahan agama, tradisi adat cucur air mawar dan saprahan (setinggi apapun derajat, tetap setara duduk melantai) dilanjutkan dengan resepsi. Sebelum proses pernikahan, pihak pengantin laki-laki membawa barang hantaran berupa perhiasan, tempat tidur, lemari, dsb.

Ketiga, masyarakat Tionghoa. Prosesi lamaran berdasarkan hari baik dalam tanggalan imlek dan ada bulan yang dianggap tidak baik untuk menikah. Tionghoa memiliki tradisi tunangan yang diselenggarakan dengan pesta kecil dan dibiayai laki-laki/perempuan sesuai kemampuan.

Tradisi uang asap untuk menopang biaya operasional pernikahan yang diberikan oleh mempelai laki-laki. Besaran uang asap bergantung pada kemampuan dan status sosial orang tua, dengan kisaran 20-50 juta.

Dalam tradisi tionghoa, uang asap terdiri dari uang pintu, uang pembalut (penanda mamaknya melahirkan anak). Bagi orang tionghoa kelas atas, uang asap bisa mencapai ratusan juta rupiah, mobil atau rumah. Besaran biaya yang harus dikeliarkan adalah antara 100 - 500 juta rupiah, komponen terbesar untuk konsumsi (katering dan minuman alkohol); biaya tunangan dan prosesinya. Dalam tradisi Dayak, kisaran biaya pernikahan untuk keperluan nikah adat memerlukan biaya sekitar belasan juta. Sedangkan keperluan pesta atau resepsi berkisar antara 20 sampai 200-an juta. Komponen terbesar adalah untuk konsumsi (Babi dan ayam) serta minuman tuak. Sedangkan dalam tradisi Melayu, kisaran biaya 20 juta sampai ratusan juta. Komponen terbesar juga untuk biaya konsumsi terlebih durasi pelaksanaan pesta resepsi untuk masyarakat Melayu memakan waktu lebih lama, bisa seharian dengan jumlah undangan lebih dari 1000 orang.

Oleh karena itu, pesta resepsi pernikahan menjadi komponen yang mungkin dibiayai dengan kredit. Alternatif program lain yang bisa ditawarkan dari Bank di luar skema Kredit adalah semacam Tabungan Rencana Pernikahan. Terkait dengan aspek "gengsi" dan "malu" jika kredit, terutama ditemukan pada etnis Melayu. Mereka lebih memilih menabung dan menunda pernikahan daripada harus berhutang.

#### Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta

Tradisi Jawa di Yogyakarta selama ini identik dengan keberadaan Keraton Yogyakarta. Sebagai pemelihara adat Jawa sekaligus strata sosial yang dilandaskan pada peringkat kebangsawanan, tradisi Jawa Keraton masih berpengaruh dalam penyelenggaraan pernikahan setidaknya hingga dua dekade lalu. Ketika itu, pilihan masyarakat terhadap varian adat Jawa, mulai dari format lamaran hingga perjamuan, secara umum masih merefleksikan jejak strata sosial berbasis kebangsawanan.

Seiring dengan menguatnya profil DIY sebagai pusat pendidikan dan kepariwisataan, strata sosial semakin tergantikan oleh pranata baru yang berbasis pada kelas ekonomi, tingkat pendidikan, dan lingkungan pergaulan. Hal ini karena pergerakan penduduk yang semakin meningkat baik secara fisik maupun pengetahuan. Sejak tahun 2000, tak kurang dari 190.000 orang di DIY setiap tahunnya melakukan migrasi masuk-keluar . Masyarakat DIY juga termasuk dalam kelompok masyarakat di Indonesia yang paling terpapar internet (APJII 2018). Sebagai konsekuensinya, strata sosial yang dulu ditentukan oleh kategori level kebangsawanan kini menjadi lebih plural dan egaliter. Kecenderungan ini juga menghasilkan perubahan nilai dalam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Kini, penyelenggaraan pernikahan tidak lagi dilandaskan pada kesakralan dan bekerjanya sistem kekerabatan tetapi lebih pada relasi yang bersifat materiil, walaupun di beberapa kawasan perdesaan, tren lama masih dapat ditemukan.

Penelitian ini menemukan rentang biaya pernikahan yang cukup ekstrim, yaitu mulai 11 juta hingga 2 milyar rupiah, hal ini berkorelasi dengan tingkat persebaran kemampuan ekonomi. Tahun 2014-2018, Indeks Gini DIY memperlihatkan angka 0,42 s.d. 0,44, atau mengindikasikan rentang level kesejahteraan ekonomi yang cukup timpang, dengan level ketimpangan tertinggi di tingkat nasional tahun 2018. Karena itu, jikalau BPS menghitung rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.140.166 (dimana pengeluaran untuk non makanan sebesar 57%), hal itu diperoleh dari variasi pengeluaran yang cukup tinggi.

Variasi pendapatan dan pergeseran nilai di atas telah menghasilkan tumbuhnya sektor bisnis penyelenggara pernikahan (wedding organizer/WO). WO kini hadir sebagai alternatif yang menawarkan ragam format mulai dari Jawa tradisional, modern-bergengsi secara kekinian, bahkan religius. Warna yang terakhir ini menunjukkan bahwa agama berhasil meyakinkan sebagian masyarakat untuk tak segan memilih format pernikahan yang sederhana sehingga berpotensi murah secara pembiayaan. Sebaliknya, perkembangan format pernikahan eksklusif juga tidak semata dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh agama. Hal ini lebih sebagai hasil dari pengaruh modernisasi, sosial media, lingkungan pergaulan dan pekerjaan.

#### Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan

Pernikahan di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis dan Makassar merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang. Melangsungkan sebuah pernikahan dibutuhkan persiapan serius, termasuk dalam hal pembiayaannya. Untuk pembiayaan pernikahan, komponen penting dalam adat pernikahan suku Bugis dan Makassar adalah uang panai' dan mahar.

Uang panai' inilah yang nantinya akan digunakan oleh pihak mempelai perempuan untuk membiayai pesta pernikahan. Namun, mengingat adat pernikahan Bugis yang terdiri dari beberapa tahap, ada kemungkinan besaran uang panai' ini tidak cukup untuk membiayai keseluruhan biaya pernikahan yang harus dikeluarkan pihak perempuan. Selain itu, karena keluarga mempelai laki-laki umumnya juga melaksanakan resepsi pernikahan setelah resepsi pernikahan yang diselenggarakan pihak keluarga perempuan, maka biaya pernikahan yang menjadi tanggunggan pihak mempelai laki-laki seluruhnya akan lebih besar daripada uang panai' dan mahar yang telah ditentukan. Besaran uang panai' memang beragam, mulai dari kisaran 17 juta sampai dengan milyaran rupiah. Semakin besar uang panai', pada umumnya juga menunjukkan semakin besar pesta pernikahan yang akan diselenggarakan. Namun

sekali lagi, uang panai' tersebut pada realitanya hanya akan membiayai sebagian dari biaya rangkaian pernikahan yang dikeluarkan kedua belah pihak.

Strata sosial merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan uang panai' mengingat uang panai' juga menjadi salah satu alat ukur untuk menentukan kesetaraan sosial mempelai pria terhadap mempelai wanita (Millar 2018). Masyarakat suku Bugis masih memperhitungkan status kebangsawanan suatu keluarga. Jika calon mempelai perempuan berasal dari keluarga bangsawan, maka uang panai' yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki akan semakin besar, khususnya jika calon mempelai laki-laki bukan berasal dari keturunan bangsawan

Selain status kebangsawanan, uang panai' juga terkait dengan kedudukan formal kedua belah keluarga (seperti kedudukan sebagai pejabat publik/pejabat pemerintah), kekayaan, dan tingkat pendidikan serta kapasitas ilmu agama, menjadi faktor yang menentukan besaran uang panai' sekaligus kemegahan pesta pernikahan yang akan dilangsungkan. Calon mempelai perempuan yang mempunyai atribut terkait dengan kekayaan, tingkat pendidikan, status kebangsawanan akan meningkatkan uang panai' yang diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan. Dalam hal ini, uang panai' sekaligus menjadi kunci bagi calon mempelai laki-laki untuk mendapatkan status sederajat dengan calon mempelai perempuan jika status sosialnya lebih tinggi.

Permintaan calon mempelai keluarga perempuan atas uang panai' ini akan menjadi prioritas utama bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya untuk dapat memenuhinya, karena: (1) upaya meningkatkan status, (2) pemenuhan uang panai' membuktikan keseriusan calon mempelai laki-laki untuk berumah-tangga, wujud kebanggaan, pemenuhan harga diri calon mempelai maupun keluarganya, (3) usaha mensejajarkan status sosial ekonomi pihak perempuan lebih tinggi daripada pihak laki-laki.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, selain uang panai', calon mempelai laki-laki juga harus dapat memenuhi permintaan mahar dari pihak keluarga perempuan. Namun, mahar pada umumnya lebih mudah dipenuhi dibandingkan dengan uang panai'. Hal ini karena dalam nilai agama Islam yang dianut mayoritas suku Bugis-Makassar, mahar sebaiknya tidak memberatkan pihak calon mempelai laki-laki.

Sementara itu, dalam rangkaian upacara pernikahan, nilai Islam (yang merupakan agama mayoritas di suku Bugis dan Makassar), dipraktekkan secara kuat pada saat akad nikah dan juga mewarnai beberapa sesi dalam setiap tahapan pernikahan yang dilangsungkan. Namun,

terkait dengan nilai dalam Islam yang mengidealkan kemudahan dalam pernikahan, uang panai' yang merupakan nilai berbasis adat setempat, kedudukannya lebih kuat. Dan nampaknya, hal ini masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

#### Pernikahan Adat Minahasa di Sulawesi Utara

Dalam tradisi masyarakat Minahasa, pernikahan merupakan tahapan terpenting dalam siklus kehidupan. Pernikahan bukan tradisi sembarangan yang diturunkan dari filosofi tonaas (pikir mendalam baru bertindak). Rangkaian acara pernikahan juga menjadi ajang untuk menunjukkan jaringan kekerabatan, posisi sosial dan status ekonomi. Pernikahan merupakan gabungan antara peristiwa agama, adat & kekeluargaan, dan administrasi sipil.

Secara sosial, masyarakat Minahasa relatif egaliter, mengingat tidak ada struktur hirarkis kelompok elit dan orang biasa. Secara pengelompokan sosial, Minahasa terbagi dalam 7 subetnis, namun tidak ada perbedaan mencolok dalam hal tradisi perkawinan. Tidak adanya hierarki ini membuat keluarga atau klan (keluarga besar) memiliki posisi dominan dalam peristiwa adat pernikahan. Di masing-masing keluarga besar biasanya akan ada yang dituakan (walikan), karena pengetahuan, pengalaman hidup, dan reputasi. Walikan akan menjadi perantara keluarga dalam tahap pernikahan, khususnya dalam pembicaraan awal dan masominta (penyerahan harta antaran).

Aspek ekonomi sangat menentukan prosesi pernikahan di Minahasa, mengingat tahap-tahap pernikahan membutuhkan pengeluaran yang besar. Di tahap awal, untuk bisa mendapatkan kesepakatan diantara mempelai dan keluarga, tradisi masominta (hantaran harta) menjadi prosesi sangat menentukan jadi atau tidaknya perkawinan. Pada tahap ini, calon mempelai laki-laki dan keluarganya harus menyerahkan sejumlah harta (sesuai kesepakatan). Semakin tinggi status sosial keluarga dan pendidikan calon mempelai putri, masominta biasanya akan semakin besar. Bentuk masominta bisa harta bergerak dan tidak bergerak (termasuk tanah atau lahan pertanian/perkebunan). Dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Bagi keluarga dengan status ekonomi tinggi, rangkaian acara resepsi bisa berlangsung selama sampai dengan 7 hari, mulai dari persiapan (2-3 hari), pelaksanaan resepsi (2 hari), dan acara keluarga besar serta acara gereja (1-2 hari). Biaya pernikahan untuk keluarga dengan status ekonomi bisa sangat besar, dengan komponen pengeluaran utama untuk bridal, dekorasi, dan makanan/minuman. Sementara bagi keluarga dengan ekonomi menengah, rangkaian pernikahan berlangsung lebih pendek, namun secara pengeluaran tetap relatif besar.

Agama memiliki peran penting dalam prosesi pernikahan. Untuk masyarakat yang beragama Islam, proses standard ijab qabul akan mendahului prosesi adat pernikahan. Sementara untuk yang beragama Kristiani (khususnya Jamaat GMIM, gereja terbesar di Minahasa), pemberkatan nikah adalah tahapan paling penting. Namun, sebelum pemberkatan ada sejumlah prosesi yang harus dilewati oleh calon mempelai dan keluarga. Prosesi pembekalan nikah ini dibimbing oleh pendeta yang bertujuan untuk mempersiapkan kedua mempelai, sekaligus tahapan untuk saling mengenalkan kedua keluarga. Pemberkatan nikah biasanya berlangsung di gereja di mana salah satu mempelai tercatat, dan keseluruhan upacara dilakukan di Geraja. Pasca resepsi, akan ada semacam 'pesta' untuk satu jamaat gereja, dan diakhir dengan 'pemberian' ke geraja sebagai ungkapan terimakasih. Dari prosesi pemberkatan ini, biaya terbesar yang dikeluarkan untuk menyewa outfit pernikahan dan pesta dengan jamaat, sementara 'pemberian' ke geraja bersifat sukarela.

#### Pernikahan Adat Sumba di Nusa Tenggara Timur

Terdapat setidaknya tiga aspek penting yang perlu dilihat untuk memahami konteks sosial ekonomi pernikahan di Pulau Sumba.

Pertama, masyarakat Sumba adalah masyarakat yang sangat komunal, di mana adat dan kekerabatan memegang peran sangat penting. Adat menempati posisi yang jauh lebih penting daripada agama dan negara. Tentu saja dalam hal ini perlu diberi catatan sungguhsungguh: bahwa yang dimaksud dengan adat sebenarnya dalah bagian dari sistem keyakinan agama lokal, yang di Sumba dikenal sebagai agama Marapu. Oleh agama modern (khususnya Kristen) dan sistem ketatanegaraan modern, agama lokal itu direduksi sehingga menjadi semata-mata adat.

Kedua, masyarakat Sumba masih menjaga stratifikasi sosial secara ketat. Orang Sumba masih menjaga lapis-lapis sosial antara bangsawan, orang biasa, dan para pelayan (yang di Sumba Timur disebut sebagai atta). Di masa modern, bangsawan menjaga superioritasnya lewat pendidikan dan jabatan birokrasi sehingga masih memperoleh penghormatan sosial yang besar. Konsekuensinya, mereka juga harus mengeluarkan biaya sosial yang tak sedikit, termasuk dalam urusan pernikahan.

Ketiga, masyarakat Sumba adalah peternak yang menjadikan hewan sebagai mata uang dalam hampir semua ekspresi keyakinan dan prosesi adat. Tahap-tahap pernikahan (yakni lamaran, penyiapan pernikahan, pengikatan pernikahan, hingga pemindahan mempelai putri

ke rumah besar mempelai pria) selalu menyertakan penyerahan sejumlah hewan ternak berupa kerbau, kuda, babi, atau sapi.

Terkait dengan ketiga aspek itu, dalam pernikahan di Sumba ada dua kelompok komponen ekonomi: (1) komponen ekonomi tradisional, (2) komponen ekonomi modern.

Komponen ini sangat terkait dengan tradisi masyarakat peternak, yang menjadikan hewan piaraan (terutama yang berkaki empat) sebagai currency dalam segala prosesi adat. Dalam perkawinan, terdapat belis yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, berupa ternak yang jumlahnya sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Jumlah belis ini sangat ditentukan oleh strata sosial pihak wanita, baik strata sosial yang ascribed (misal, putri bangsawan) atau achieved (misal, pendidikan atau pekerjaan).

Meski bisa dikonversi ke dalam rupiah, sebenarnya ternak tak bisa begitu saja dihitung dari aspek harga atau nilai tukar terhadap mata uang. Jika ada permintaan ternak 100 ekor, misalnya, itu bukan berarti pihak laki-laki harus mengeluarkan uang untuk membeli 100 ekor ternak (yang total bisa mencapai Rp. 50.000.000,- per ekor). Ternak yang diminta itu adalah hasil urunan seluruh keluarga besar, yang kemudian diperhitungkan sebagai budi baik yang kelak harus dibalas dengan sepadan. Barang-barang lain yang memiliki makna seperti ternak ini (yakni memiliki nilai konversi terhadap rupiah, namun sebenarnya hampir tak pernah diperjual-belikan) termasuk pula gading, kain tenun, bahkan parang.

Komponen ekonomi modern di Sumba mencakup biaya untuk memasak hewan ("uang bumbu"), biaya menikah menurut agama, dan biaya untuk mengadakan resepsi pernikahan. Yang wajib ada sebenarnya adalah uang bumbu. Biaya pernikahan menurut agama relatif kecil. Sementara itu, biaya resepsi juga biasanya tak terlalu signifikan, sebab perayaan pernikahan biasanya sudah dimasukkan dalam prosesi adat, yang setiap kali disertai dengan penyembelihan hewan untuk dimakan bersama

#### Komunalitas

Ilmuwan sosial biasanya menggunakan istilah komunalitas untuk menjelaskan derajat keeratan sebuah sistem sosial. Dalam konteks pernikahan sebagai sebuah peristiwa sosial, faktor derajat keeratan sosial menjadi satu hal yang muncul di semua lokasi penelitian dan kemudian mempengaruhi dimensi ekonomi dari pelaksanaan pernikahan. Detail catatan tentang komunalitas disajikan dalam bagian berikut.

#### Komunalitas dalam Pernikahan di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat terdiri dari tiga etnis besar yaitu etnis Dayak, etnis Melayu dan etnis Tionghoa. Ketiga etnis tersebut memiliki karakter komunalitas yang berbeda dalam penyelenggaraan pernikahan maupun dalam pembiayaan pernikahan. Terkait dengan pembiayaan pernikahan, ketiga etnis menyelenggarakan pernikahan dengan pembiayaan ditanggung oleh keluarga inti dan mempelai.

Bagi etnis Dayak Kanayatn, pembiayaan pernikahan ditanggung oleh masing-masing keluarga mempelai, tergantung dimana pesta adat akan diselenggarakan. Keluarga inti menjadi sumber pembiayaan yang utama bagi masyarakat dayak Kanayatn. Salah satu mempelai dari suku Dayak Kanayatn menceritakan bahwa pembiayaan pernikahannya ditanggung oleh kakak laki-laki yang mengemban tanggung jawab setelah kematian bapaknya. Meskipun demikian, mempelai juga turut membantu biaya pernikahan sekitar 20 % dari total pembiayaan. Ketika masyarakat dayak tidak memiliki uang untuk biaya pernikahan, maka mereka lebih memilih meminjam kepada Credit Union yang mengunggulkan solidaritas antar anggota.

Sedangkan untuk etnis tionghoa, pembiayaan seringkali ditanggung oleh keluarga inti. Mereka meyakini bahwa pernikahan adalah tanggung jawab orangtua. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan mempelai yang membiayai seluruh kebutuhan pernikahan. Biasanya kondisi ini dialami oleh mempelai yang sudah memiliki tabungan dan mempersiapkan pernikahan secara matang. Sementara itu, pembiayaan etnis melayu juga bergantung kepada keluarga inti, khususnya orang tua.

Dari sisi penyelenggaraan, pernikahan etnis dayak, melayu dan tionghoa didominasi oleh pernikahan adat. Kuatnya tradisi adat mengikat komunalitas masyarakat di ketiga etnis tersebut. Untuk masyarakat dayak, upacara pernikahan adat menjadi ruang untuk silahturahmi karena tamu undangan terdiri dari keluarga besar dan tetangga kampung yang diundang secara lisan. Namun, kehadiran teknologi berupa sms maupun *Whats App*, mengubah tradisi penyampaian undangan secara lisan. Selain itu, pernikahan adat menjadi moment bagi keluarga besar untuk memberikan dukungan baik secara material (sumbangan uang dan bahan makanan) maupun non material (membantu proses upacara pernikahan).

Bagi masyarakat melayu, komunalitas tampak pada tradisi pernikahan yang memiliki prosesi cukup panjang, sejak lamaran sampai dengan acara berzanji pasca resepsi. Dalam setiap proses, pernikahan melibatkan keluarga besar, tetangga dan teman. Tradisi saprahan

(makan bersama di atas kain saprah) dalam etnis Melayu yang memiliki makna "setinggi apapun derajatnya, tetap setara duduk melantai" semakin memperkuat ikatan keluarga besar. Tradisi ini mengutamakan kebersamaan dan, persaudaraan, tanpa membedakan status sosial maupun status ekonomi. Selain itu, komunalitas etnis melayu tampak dalam gotong royong mempersiapkan hidangan makanan sampai dengan membersihkan piring kotor yang dilakukan oleh keluarga besar dari orang dewasa sampai anak kecil.

Komunalitas sedikit berbeda terlihat pada masyarakat Tionghoa, yang lebih mengandalkan keluarga inti dalam mempersiapkan penyelenggaraan pernikahan. Pelibatan keluarga besar terjadi ketika prosesi pertunangan dan tradisi minum teh sebelum resepsi dilakukan. Sementara dalam resepsi, pernikahan tionghoa lebih mengandalkan vendor untuk menyiapkan segala kebutuhan pesta.

#### Komunalitas di Alam Minang, Sumatera Barat

Corak komunalitas dalam pernikahan di adat di Minang yang ada di Sumatera Barat terbagi dalam dua kelompok besar: *Darek* dan *Rantau*. Darek adalah daerah di Sumatera Barat yang mayoritas berada di pegunungan. Darah ini secara kultural terbagi ke dalam tiga *luhuk*. Tiga daerah komunitas *darek* ini sekarang terbagi ke dalam kabupaten-kabupaten atau kota yang ada di daerah daratan/pegunungan, seperti Kabupaten Agam (termasuk di dalamnya Kota Bukittinggi), Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota,. Sedangkan *rantau* di dalam tradisi Minang merujuk daerah yang berada di luar *darek* atau daratan tersebut yang biasa daerah-daerah di Kawasan pesisir seperti Pariaman dan Padang.

Corak komunalitas di *darek*, dengan mengambil contoh Kota Bukittinggi sebagai area penelitian untuk Kawasan *darek*, cenderung terbatas pada relasi kekeluargaan yang sedarah. Dalam pernikahan di Bukittinggi sebagai representasi kawasan *darek*, semua tahapan dan prosesi pernikahan praktis hanya sampai melibatkan keluarga dan kerebat satu darah terutama dari garis ibu dimana paman mempelai dari saudarai ibu yang dituakan atau *mamak* bertanggung jawab pada prosesi adat dan agama yang harus dilalui sang mempelai. Biaya pernikahan dan teknis penyelenggaraan pernikahan sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua mempelai.

Sedangkan bentuk komunalitas di *rantau* terutama Pariaman sebagai salah satu daerah penelitian, lebih besar melibatkan anggota komunitas satu kampung sekalipun tidak mempunyai hubungan darah. Bukan hanya *ninik-mama*k keluarga pengantin saja yang bertanggung jawab atas jalannya pernikahan, tetapi para ninik-mamak dan pemangku adat

di satu kampung juga ikut bertannggung jawab, bahkan tetangga dan warga satu kampung juga mempunyai kewajiban social atas tetengga atau warga lain yang menyelenggarakan pernikahan. Tanggung jawab dan kewajiban social inilah yang kemudian menjadi semacam kontrak social yang menciptakan komunalitas kolektif dalam satu kampung di daerah *rantau* terutama Kawasan Pariaman. Pada titin inilah, kita akan lebih mengeksplorasi komunalitas di Pariaman, sebagai representasi daerah rantau, karena kuatnya tradisi dan ikatan sosial dalam praktik pernikahan.

Dalam praktiknya, komunalitas di Kawasan *rantau* seperti Pariaman terlihat jelas dalam acara paling penting dari keseluruhan proses pernikahan, yaitu: *baralek* alias pesta nikah. Bahkan, orang yang tidak melaksanakan baralek dianggap 'nikah gantung' atau belum sepenuhnya menikah. Hal ini penting untuk menjelaskan posisi pesta pernikahan yang mampu mendemonstrasikan sejauh mana 'kontrak sosial' terjadi di antara warga satu sama lain.

Bagian penting di Pariaman yang mungkin tidak ada dalam tradisi pesta pernikahan di daerah lain adalah bagian dimana seorang perwakilan empunya hajat menyebutkan keras-keras (jamak dengan alat pengeras suara) di muka umum bahkan terdengar nyaring satu kampung tentang jumlah uang yang diterima dan siapa pemberinya. Sesi ini dilakukan pada malam hari. Warga dan tetangga satu kampung, pada sesi malam hari ini, berkumpul dan mengantri memberikan uang lalu pembawa acara mengumumkan siapa pemberi dan jumlah uang yang diberikan. Tetangga dan kerabat jauh yang memberikan uang di dalam amplop pada siang hari juga diumumkan.

Para *mamak* dalam satu kampung, bukan hanya mamak dari keluarga empunya hajat, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa uang yang diterima empunya hajat mampu menutup biaya keseluruhan pernikahan termasuk *uang jemput* yang dibebankan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hingga biaya pesta nikah tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, setiap warga akan merasa 'wajib' datang dan memberikan sejumlah uang dalam pesta nikah karena terjadi 'saling membalas' uang yang diberikan antara warga yang menyelenggarakan pernikahan di kemudian hari. Hal inilah yang menjelaskan proses *baralek* menciptakan mekanisme 'arisan massal' bagi warga watu kampung.

#### Komunalitas dalam Pernikahan di Yogyakarta

Tradisi pernikahan adat di Yogyakarta masih ditandai dengan komunalitas yang kuat dalam penyelenggaraan pernikahan. Rewang menjadi tradisi yang masih bertahan hingga saat ini,

meskipun keberadaan wedding organizer mempermudah persiapan pernikahan. Baik di wilayah pedesaan Bantul dan Sleman, tradisi rewang menunjukkan kuatnya ikatan kekeluargaan di masyarakat. Jumlah orang yang rewang dan lamanya waktu rewang turut ditentukan pernikahan diselenggarakan. Pernikahan yang oleh lokasi dimana diselenggarakan di rumah ketika resepsi maupun ngunduh mantu, melibatkan banyak tetangga dan keluarga sejak seminggu sebelum acara dilaksanakan. Mereka membantu keluarga dan mempelai menyiapkan makanan "ater-ater" maupun membantu persiapan teknis pernikahan. Sementara itu, pernikahan yang diselenggarakan di gedung dan hotel tidak membutuhkan keterlibatan banyak orang dan waktu relatif lebih pendek dibanding penyelenggaraan di rumah. Selain membantu mempersiapkan makanan, keluarga dan tetangga dekat yang tergabung dalam kepanitiaan membantu pelaksanaan resepsi di gedung maupun hotel. Salah satu narasumber menyebutkan bahwa keterlibatan keluarga dan tetangga sangat membantu penyelenggaraan resepsi sehingga mempelai tidak perlu menggunakan jasa wedding organizer. Dengan demikian, tradisi rewang yang masih kuat di Yogyakarta dapat membantu meringankan biaya pernikahan.

Komunalitas juga dapat dilihat dari tamu yang diundang dalam pesta pernikahan. Biasanya, orang menganggap bahwa undangan pernikahan dapat menjadi alat untuk menjalin silahturahmi dengan keluarga maupun kolega. Namun, terkadang jumlah undangan yang terlampau banyak tidak cukup efektif dalam memberikan ruang untuk berinteraksi antara mempelai, keluarga dan tamu undangan. Oleh karena itu, pernikahan dengan jumlah undangan yang terbatas mulai menjadi tren dua tahun terakhir di Jogja. Mempelai dan keluarga memilih menggunakan model private party di hotel maupun restoran, dibandingkan mengundang ribuan tamu yang tidak semua dikenal dengan baik. Dengan menyelenggarakan private party dengan jumlah undangan sekitar 100-200 orang, hubungan yang lebih intim dengan tamu undangan dapat terjalin dengan baik.

Dari sisi pembiayaan, karakter komunalitas tidak terlalu kuat dalam penyelenggaraan pernikahan di Yogyakarta. Pernikahan merupakan urusan keluarga inti dan mempelai. Dalam hal ini, keluarga besar tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menopang biaya pernikahan. Dari beberapa narasumber, sumber pendanaan yang utama berasal dari orang tua. Keluarga mempelai masih meyakini bahwa ketika menggelar hajatan pernikahan untuk anak perempuannya, maka tanggungjawab tersebut masih berada di pihak keluarga mempelai perempuan. Keluarga meyakini bahwa pernikahan merupakan kewajiban dan tanggungjawab terakhir yang harus dipenuhi oleh orangtua untuk anak perempuan maupun

anak laki-lakinya. Ketika ayah mempelai perempuan telah meninggal, maka tanggung jawab menikahkan beralih ke tangan kakak laki-laki.

Meskipun pesta pernikahan dibiayai oleh keluarga inti, beberapa mempelai turut menopang pembiayaan untuk meringankan beban orang tua. Misalnya saja, mempelai yang menanggung biaya dekorasi, rias, souvenir maupun dokumentasi. Namun, bagi mempelai yang memiliki keuangan cukup stabil lebih memilih untuk membiayai pernikahannya sendiri tanpa mengandalkan orang tua. Pasangan ini tidak banyak melibatkan orang tua karena mereka menginginkan agar orang tua cukup datang dan menikmati acara.

#### Komunalitas Sulawesi Selatan (Bugis - Makassar)

Panjangnya ritual pernikahan etnis Bugis sejalan dengan "kerepotan" yang ditimbulkannya. Namun, kerepotan ini justru menjadi sesuatu yang dicari, karena hal tersebut memperlihatkan peran dan/atau penerimaan seseorang di masyarakat (Millar 2018: 138). Bahkan bagi mereka yang tidak diundang, keberadaan orkes pengiring pesta atau orgen tunggal, menjadi hiburan rakyat gratis dan menunjukkan status ekonomi penyelenggara – terlebih saat artis yang diundang merupakan artis terkenal ibukota.

Kerepotan utama yang sangat memerlukan keterlibatan kerabat dan tetangga tentu paling terlihat pada proses memasak. Walaupun peran ini sudah banyak digantikan oleh catering di kota-kota besar, namun catering seringkali hanya memiliki peran saat pesta tersebut dilaksanakan di gedung. Sedangkan, prosesi adat lainnya yang diselenggarakan di rumah akan sangat bergantung pada kekuatan komunalitas kerabat dan tetangga. Jarak sejak mappatuada sampai akad nikah berada di kisaran 2 – 5 minggu. Dalam jangka waktu tersebut, hampir setiap hari dilaksanakan berbagai persiapan, termasuk mappaci, di kediaman kedua mempelai. Selama itu pula, keluarga harus terus menyiapkan dana untuk menyambut kerabat, terutama untuk makanan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya proporsi pengeluaran untuk makanan dalam prosesi pernikahan,

Selain proses memasak yang melibatkan para tetangga, dalam prosesi adat Bugis juga terdapat apa yang disebut dengan *baruga*, yaitu bangunan resepsi sementara (Millar 2018: 137). Baruga biasanya dibangun pasca prosesi mappatuada sebagai simbol bahwa suatu keluarga akan menyelenggarakan pernikahan. Pembangunannya melibatkan masyarakat setempat, dengan biaya per/orangnya sekitar Rp 50.000 untuk sekitar 5orang pekerja, bergantung pada ukuran baruga. Selama proses pembangunan baruga ini, keluarga penyelenggara juga akan menyiapkan makanan dan minuman bagi para tukang. Selain itu,

keluarga juga harus membeli, atau menyewa, material bangunan untuk baruga ini. Baruga ini biasanya bertahan sampai 3 bulan pasca pesta pernikahan, untuk kemudian disimpan jika keluarga tersebut masih memiliki anggota keluarga yang belum menikah.

Dalam perkawinan Bugis, tamu memiliki peran penting sebagai "hakim" atas makna suatu pesta perkawinan; apakah suatu pesta perkawinan dianggap sukses dinilai dari variasi dan kualitas makanan, kostum adat dan aksesoris, dekorasi, jumlah tamu undangan dan jumlah tamu yang hadir (Millar 2018: 121). Keberadaan tamu, dan jumlah orang yang membantu suatu prosesi pernikahan secara implisit menggambarkan penerimaan sosial seseorang di masyarakat. Sehingga, bagi mereka yang tidak menduduki jabatan publik di wilayah pedesaan namun memilih untuk menyelenggarakan pernikahan di gedung, justru akan menjadi bahan gunjingan. Walaupun terlihat lebih praktis dan murah, namun bagi masyarakat pedesaan, pesta di gedung justru dianggap sebagai ekspresi kekhawatiran atas sedikitnya orang yang akan memberikan bantuan materi dan tenaga – sebagai akibat dari perannya yang minim di masyarakat (Millar 2018: 138).

Oleh karenanya, berbeda dengan di kota besar seperti Makassar, dimana wedding organizer mulai menjamur dan pernikahan menjadi sebuah industri, bagi masyarakat pedesaan, pernikahan merupakan pesta kampong yang persiapan dan penyelenggaraannya melibatkan banyak orang, untuk kemudian dinikmati oleh seluruh kampung.

# Komunalitas di Sumba: Kolektivitas adalah kekuatan, solidaritas adalah kebanggan

Kehidupan bermasyarakat Sumba memiliki dua konsep kunci yaitu solidaritas dan kolektivitas sosial. Dua konsep kunci tersebut merupakan produk kentalnya komunalitas Sumba yang berfungsi sebagai penyeimbang harmoni masyarakat Sumba . Kepentingan individu tidak dikenal di Sumba namun kepentingan *kabihu* (keturunan) dan kepentingan *paraingu* (kampung). Salah satu narasumber kami menyebutkan "kolektivitas adalah kekuatan, solidaritas adalah kebanggaan (Darius Praing 2018).

Pernikahan tidak lepas dari konsep solidaritas dan kolektivitas sosial. Bagi masyarakat Sumba, pernikahan adalah peristiwa sosial suku. "Ambu nambada na epi la au, ambu namini na wai la mbalu artinya agar api tidak padam dan air di tempayan tidak kering" adalah falsafah Sumba dalam melaksanakan pernikahan. Artinya, pernikahan tidak hanya menjadi keberlanjutan hubungan individu lelaki dan perempuan namun peristiwa sosial suku antar kabihu antar paraingu.

Manifestasi solidaritas dan kolektivitas sosial dalam pernikahan adalah *belis. Belis* adalah penghargaan yang diberikan pihak keluarga lelaki kepada pihak keluarga perempuan. Ternak sebagai penggerak roda ekonomi utama masyarakat Sumba menjadi "alat tukar" dalam pem*belis*-an. Pem*-belis*-an ini tidak hanya berasal dari keluarga inti pihak calon mempelai lelaki namun berasal dari "arisan" keluarga besar (*kabihu/paraingu*). Untuk Sumba Barat, *belis* biasanya berupa kuda, kerbau dan sapi sedangkan Sumba Timur berupa kuda dan kerbau. Selain itu, di Sumba Barat *belis* dihitung dengan satuan ekor sedangkan Sumba Timur penghitungan *belis* dengan satuan pasangan. Sebelum masuk dalam tahapan awal pernikahan "ketuk pintu", keluarga inti akan mengumpulkan keluarga besar untuk mengabarkan rencana mereka tersebut dan meminta semangat solidaritas keluarga untuk secara kolektif menyumbang hewan ternak.

Banyaknya jumlah belis ditentukan tiga faktor yaitu pertama strata sosial dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai lelaki. Bagi masyarakat Sumba Barat, strata sosial seseorang dapat dilihat dari nama suku atau kabihu. Sementara strata sosial di Sumba Timur lebih mudah dilihat karena masyarakat Sumba Timur mengenal stratifikasi sosial berupa Raja, maramba, orang biasa, dan ata atau hamba. Kedua, pendidikan dan jabatan dari calon mempelai perempuan. Ketiga, jumlah belis Mama atau pihak Ibu dari calon mempelai perempuan. Idealnya, jumlah belis calon mempelai perempuan tidak boleh terpaut jauh dengan belis Ibunya. Seiring dengan perkembangan zaman beberapa masyarakat Sumba sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Prinsip harmoni masyarakat masih dijunjung tinggi sehingga belis diberikan semampunya. Meski pun kata mampu dalam masyarakat Sumba sangat terkait dengan harga diri dan gengsi atau kebanggaan. Tidak hanya harga diri dan gengsi individu namun kolektif.

Pernikahan adat dilaksanakan sebelum pernikahan di gereja dan pernikahan catatan sipil (negara). Wilayah Sumba adalah salah satu wilayah di Indonesia dimana pernikahan agama dan catatan sipil belum berada satu pintu. Masyarakat Sumba mempercayai bahwa pasangan yang menikah secara adat sudah melakukan pernikahan resmi atau legal. Tingginya biaya pernikahan adat dan biaya pesta yang mengundang seluruh keluarga besar mengakibatkan banyak masyarakat Sumba mencukupkan prosesi pernikahan sampai ke pernikahan adat. Pihak Gereja memberikan penggembalaan kepada masyarakat untuk melakukan pernikahan di Gereja. Demikian juga dengan pihak catatan sipil yang mendatangi langsung ke warga untuk mendaftarkan diri pernikahan mereka di negara. Permasalahannya adalah pernikahan adat Sumba dilakukan dalam keyakinan marapu yang diakui sebagai salah satu kepercayaan di Indonesia dan tercantum dalam KTP namun tidak legal untuk melakukan prosesi pernikahan. Sebagian masyarakat Sumba enggan untuk melakukan prosesi

pernikahan di Gereja sebelum melanjutkan tahapan ke catatan sipil. Tahapan yang putus antara pernikahan adat dalam kepercayaan *marapu* dan pernikahan negara menyebabkan banyak masyarakat Sumba yang tidak mencatatkan pernikahan mereka.

#### Komunalitas di Minahasa

Minahasa merupakan etnis yang memiliki ikatan marga cukup tinggi. Barangkali selain etnis Batak, etnis yang menggunakan marga dengan cukup konsisten dan menjadi penanda identitas yang cukup serius hanyalah Minahasa. Ikatan kekeluargaan yang kuat ini juga tercermin dalam pelaksanaan pernikahan.

Biaya yang timbul dari pernikahan di Minahasa biasanya secara umum ditanggung oleh keluarga kedua mempelai, baik keluarga besar maupun keluarga inti. Orangtua mempelai laki-laki memiliki tanggungjawab untuk menyediakan uang dan barang kebutuhan rumah tangga yang akan diberikan kepada calon besan saat prosesi *antar harta*. Sementara orangtua mempelai perempuan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pesta pernikahan dengan sebaik mungkin. Bila keluarga laki-laki menghendaki, kadang selain pesta di rumah pihak perempuan, diadakan juga pesta yang tidak kalah meriah di rumah mempelai laki-laki.

Pengumpulan data di lapangan menemukan perbedaan derajat kuatnya ikatan kekeluargaan diantara masyarakat yang tinggal di daerah urban, sub-urban, dan daerah rural. Di daerah urban yang diwakili oleh Kota Manado, pernikahan benar-benar terbatas menjadi tanggungjawab orangtua kedua mempelai. Gereja sebagai institusi yang berpengaruh juga selalu melibatkan orangtua kedua mempelai dalam kegiatan persiapan pernikahan yang sering disebut penggembalaan. Dalam beberapa kasus, mempelai yang sudah memiliki pekerjaan tetap juga turut berkontribusi bagi pembiayaan perkawinan.

Sementara di daerah sub-urban yang diwakili oleh Kota Tomohon, keluarga yang terlibat dalam memenuhi biaya perkawinan tidak terbatas pada orangtua kedua mempelai saja. Saudara kedua orang tua, bahkan kakek dan nenek kedua calon mempelai, bila mampu, juga masih berkontribusi untuk memeriahkan pesta perkawinan. Salah satu responden yang baru saja menikahkan anaknya menyatakan bahwa orangtuanya (kakek mempelai) memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pesta perkawinan yang diadakan di rumah.

Kuatnya solidaritas antar warga masyarakat semakin terasa saat melihat praktik perkawinan di Kota Tondano yang dapat dikategorikan sebagai daerah rural. Di sini, selain keluarga besar, tetangga kampung juga turut berkontribusi memikul biaya pernikahan salah satu anggota masyarakatnya. Kontribusi yang diberikan memang tidak selalu dalam bentuk uang,

namun dapat juga dalam bentuk barang mentah untuk dimasak atau tenaga untuk membantu persiapan pesta pernikahan. Bahkan di beberapa kampung dapat ditemui arisan pan stove yang berisi makanan matang untuk orang yang sedang menyelenggarakan perkawinan.

Masyarakat Minahasa menekankan pentingnya dimensi pesta dalam kegiatan masyarakat apapun. Tak terkecuali dalam persitiwa pernikahan. Ini berimplikasi pada besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah pesta perkawinan. Salah satu prinsip yang seringkali didengar saat pengumpulan data adalah lebih baik menyediakan makanan dan minuman berlebih daripada kurang. Bila ada sebuah pesta mengalami kekurangan stok hidangan, maka ini akan menjadi aib keluarga yang niscaya dibicarakan secara terus menerus oleh warga sekitar.

Selain pesta pernikahan di rumah atau di gedung, institusi agama juga turut menguatkan ikatan sosial masyarakat dalam sebuah pernikahan. Awalnya setiap mempelai yang menikah harus menyampaikan rencana pernikahannya kepada pendeta masing-masing hingga kemudian kedua pasangan diminta untuk memilih gereja mana yang akan mereka ikuti setelah menikah. Gereja juga mengumumkan rencana pernikahan setiap jemaatnya paling tidak satu bulan sebelum hari pernikahan untuk memastikan tidak ada anggota jemaat lain yang keberatan dengan pernikahan yang akan dilangsungkan. Kemudian setelah pemberkatan pernikahan yang menjadi ciri sahnya sebuah pernikahan Kristen, kedua pengantin juga masih melakukan satu kali lagi upacara di gereja untuk mengucapkan syukur atas terselenggaranya pernikahan mereka.

## Potensi Ekonomi Pernikahan

Hasil analisis atas wawancara, observasi dan *focus group discussion* di enam provinsi menunjukkan bahwa pernikahan memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Untuk memperkirakan potensi ekonomi pernikahan di enam provinsi yang menjadi lokasi studi, tim peneliti mengumpulkan informasi tentang biaya perkawinan yang disebutkan oleh responden di setiap daerah. Dari berbagai nominal biaya yang dinyatakan oleh responden, kemudian diambil jumlah rata-rata biaya pernikahan di satu provinsi. Rata-rata biaya ini kemudian dikalikan dengan jumlah peristiwa pernikahan yang dicatat oleh BPS dalam satu tahun. Angka yang ditemukan kemudian dapat menjadi salah satu indikator untuk dapat menilai potensi ekonomi pernikahan.

Selain data yang mengkombinasikan dari sumber primer dan data sekunder, studi ini juga melihat rata-rata biaya pernikahan yang telah dipublikasikan BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Mengingat rata-rata biaya pernikahan yang dicatat dalam Susenas cenderung terlalu rendah bila dibandingkan dengan rata-rata biaya pernikahan menurut informasi primer dari responden yang ditemui di lapangan, maka data dari Susenas dijadikan sebagai patokan minimal untuk menghitung potensi ekonomi pernikahan. Sementara data dari sumber primer yang dikalikan dengan jumlah pernikahan dalam satu tahun menjadi batas atas untuk menaksir potensi ekonomi pernikahan di satu daerah.

Tabel 1. Perkiraan Potensi Ekonomi Pernikahan Per Tahun di Setiap Provinsi

Provinsi	Batas Bawah	Batas Atas
Sumatera Barat	Rp 29,8 Milyar	Rp 93,1 Milyar
Daerah Istimewa Yogyakata	Rp 1,1 Triliun	Rp 4,3 Triliun
Kalimantan Barat	Rp 132 Milyar	Rp 241 Milyar
Sulawesi Utara	Rp 96 Milyar	Rp 614 Milyar
Sulawesi Selatan	Rp 500 Milyar	Rp 931 Milyar

Range angka-angka potensi ekonomi dalam tabel di atas merupakan perkiraan nilai ekonomi yang dihasilkan dengan mengkombinasikan analisis atas data primer dan data sekunder. Berhubung jumlah uang yang berputar secara riil dari peristiwa pernikahan setiap tahun cukup susah untuk diperhitungkan dengan tepat, maka angka estimasi dalam tabel tersebut dapat digunakan menjadi indikasi awal untuk mengukur skala ekonomi perinikahan di setiap provinsi.

Catatan lain yang perlu disampaikan adalah angka potensi perekonomian untuk pernikahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dapat ditampilkan karena BPS di NTT tidak memiliki data jumlah pernikahan yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu, sumber data primer dari riset lapangan di NTT menyebutkan bahwa ada banyak sekali aset yang berpindah tangan atau dijual untuk membiayai prosesi pernikahan namun aset-aset yang digunakan adalah aset yang agak rumit untuk dikuantifikasi seperti binatang ternak, kain tenun, atau perhiasan. Sehingga, tim peneliti memutuskan untuk mengecualikan angka perkiraan bagi provinsi NTT. Meskipun demikian, alih-alih mengurangi besaran potensi ekonomi pernikahan di NTT, penjelasan tersebut justru menunjukkan bahwa NTT sesungguhnya memiliki potensi yang besar walau membutuhkan pendekatan yang sedikit berbeda bila dibandingkan daerah lain.

# **Faktor-Faktor Penentu Biaya Pernikahan**

Setelah menemukan angka perkiraan potensi ekonomi pernikahan, langkah yang perlu dilakukan berikutnya adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar/kecilnya biaya pernikahan. Ini merupakan langkah strategis mengingat temuan lapangan menunjukkan variasi biaya yang cukup lebar antar satu pasangan dengan pasangan lain walau mereka berada dalam satu konteks adat atau prosesi keagamaan yang sama.

Hasil analisis atas temuan di enam provinsi yang dibahas bersama dengan tim inti menunjukkan bahwa paling tidak ada empat faktor yang menentukan tinggi rendahnya biaya perkawinan, yaitu: pendapatan, prestise sosial, penggunaan prosesi adat, dan sumber pembiayaan utama.

### Pendapatan

Semakin tinggi pendapatan pihak yang menanggung biaya pernikahan, semakin tinggi pula biaya pernikahan tersebut.

Pendapatan mengacu pada nilai uang yang diterima oleh orang yang membiayai pernikahan. Biaya ini bisa ditanggung oleh pasangan yang menikah, oleh orangtua salah satu atau kedua pasangan yang menikah, atau bisa juga ditanggung oleh beberapa anggota keluarga yang dekat dengan kedua mempelai. Bahkan dalam kasus masyarakat di Manggarai, NTT, pernikahan merupakan hajat kolektif satu suku. Sehingga biaya pernikahan pun biasanya ditanggung secara kolektif oleh suku yang bersangkutan. Oleh karena itu, kemampuan

finansial yang perlu diukur untuk melihat potensi ekonomi sebuah pernikahan berkaitan langsung dengan pihak mana yang membiayai perkawinan tersebut.

Secara umum pendapatan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pendapatan dapat dikatan tinggi bila pendapatan pihak yang menanggung biaya pernikahan bersifat tetap dan pasti. Tentu saja pendapatan yang tetap dan pasti tidak selalu tinggi nominalnya namun dalam beberapa kasus, kepastian dan ketetapan pendapatan dapat digunakan sebagai sebuah aset untuk mencari pinjaman ke bank. Keputusan mengajukan pinjaman seperti ini biasanya diambil oleh orang yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sebaliknya, bila jumlah pendapatannya tidak tetap serta tidak pasti waktu kedatangnya seperti tukang bendi atau penjual makanan keliling, maka status pendapatannya dapat dikategorikan rendah. Diantara kedua kategori tersebut ada pula responden yang memiliki pendapatan tetap walau jumlahnya tidak pasti seperti orangorang yang bekerja di sektor jasa secara freelance atau responden dengan pendapatan yang jumlahnya pasti walau tidak tetap seperti dalam kasus pegawai kontrak.

### **Prestise Sosial**

Semakin tinggi prestise sosial penyelenggara pernikahan, semakin tinggi pula biaya pernikahan tersebut.

Prestise sosial mengacu pada posisi sosial atau posisi sosial seseorang atau sebuah keluarga di tengah masyarakatnya. Walau prestise sosial kerap berhimpitan dengan pendapatan, namun data kami menunjukkan bahwa ada pula kelompok masyarakat yang memiliki prestise sosial tinggi walau pendapatannya rendah. Bentuk konkrit prestise sosial ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya di Sumatera Barat, penelitian ini menemukan bahwa *Ninik Mamak* yang menjadi pemangku adat di sebuah *nagari* memiliki posisi penting di setiap prosesi pernikahan. Sehingga, ketika salah satu bagian dari keluarga *Ninik Mamak* melangsungkan pernikahan, terlepas dari kemampuan finansialnya, maka pesta perkawinan cenderung dibuat semeriah mungkin. Di tempat lain seperti Manado atau Tomohon di Sulawesi Utara, pemuka gereja memiliki posisi sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Sehingga, pernikahan yang dilangsungkan oleh keluarga pemuka gereja biasanya menghabiskan biaya yang tinggi.

Selain kelompok masyarakat yang secara tradisional atau secara keagamaan memiliki posisi tinggi, prestise sosial biasanya juga melekat pada diri pemimpin formal di setiap daerah. Mulai dari kepala desa sampai kepala pemerintahan di provinsi. Semakin tinggi jabatan formal yang dipegang oleh orangtua mempelai, niscaya semakin meriah pula pestanya.

### Penggunaan Prosesi Adat

Semakin panjang, lengkap dan runut prosesi adat yang dilalui, semakin tinggi pula biaya pernikahan tersebut.

Bila dibandingkan dengan prosesi pernikahan berbasis ritual agama atau untuk pencatatan administrasi kependudukan oleh negara, prosesi adat memiliki peran yang jauh lebih penting dalam menentukan biaya pernikahan. Hampir di semua tempat, komponen biaya yang paling besar muncul dari kebutuhan untuk mengikuti tahapan pernikahan menurut adat di masingmasing tempat. Namun tentu saja tidak semua keluarga mengikuti atau masih menjalankan setiap langkah prosesi adat dalam semua pernikahan.

Keluarga atau mempelai mengikuti atau tidak mengikuti proses adat dengan panjang, lengkap, dan runut karena dua hal. Pertama adalah struktur sosial masyarakat adatnya dan yang kedua adalah lokasi geografis tempat masyarakat tinggal dalam kuadran urban – rural. Dalam masyarakat dengan struktur adat yang hierarkis, kepatuhannya pada prosesi adat dalam pernikahan cenderung tinggi. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Sehingga, masyarakat yang tinggal dalam struktur adat yang hierarkis serta posisi geografisnya ada di desa cenderung menggunakan prosesi adat dengan panjang, runtut, dan lengkap. Kencederungan yang sebaliknya juga berlaku, bila masyarakat berada di tengah struktur masyarakat adat yang egaliter dan tinggal di kota, maka kepatuhannya pada prosesi adat cenderung rendah.

Tabel 2. Kecenderungan mengikuti prosesi adat berdasarkan struktur dan tempat tinggal

		Lokasi geografis tempat tinggal		
		Urban	Rural	
Struktur sosial masyarakat	Hierarkis	Sedang Bukittinggi (Sumatera Barat) Kota Yogyakarta (DIY)	Tinggi Sumba (Nusa Tenggara Timur) Padang Pariaman (Sumatera Barat) Sleman dan Bantul (DIY)	

Egaliter	Rendah Kota Manado (Sulawesi Utara) Pontianak (Kalimantan Barat)	Sedang Tondano dan Tomohon (Sulawesi Utara)
----------	--	---

Dari dua parameter di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah dengan stuktur adat yang hierarkis serta tinggal di desa cenderung menggunakan prosesi adat secara tinggi. Sementara daerah dengan struktur egaliter dan bertempat tinggal di kota cenderung menggunakan prosesi adat secara rendah di dalam pernikahan. Diantara kedua kategori ini ada kelompok masyarakat yang strukturnya hierarkis namun tinggal di daerah urban dan kelompok masyrakat yang egaliter namun tinggal di desa. Kedua kelompok terakhir ini cenderung berada di tengah dan dapat dikategorikan mengikuti prosesi adat secara moderat.

## Sumber Pembiayaan Utama

Semakin banyak/luas pihak yang menanggung biaya pernikahan, semakin tinggi pula biaya pernikahan tersebut.

Faktor terakhir yang memengaruhi biaya sebuah pernikahan berkaitan dengan siapa yang menanggung biaya pernikahan tersebut atau sumber pembiayaan utama. Bila pernikahan menjadi prosesi yang dibiayai secara kolektif di dalam satu komunitas seperti di Manggarai NTT atau di daerah pesisir Minang, Pariaman, Sumatera Barat, maka biaya pernikahannya juga akan semakin besar. Sebaliknya, bila biaya pernikahan ditanggung oleh kedua mempelai, prosesi pernikahan biasanya akan lebih sederhana dan biaya yang muncul dari pernikahan tersebut juga tidak akan terlalu banyak. Diantara sumber besar dan sumber kecil, masih banyak pula pernikahan yang dibiayai oleh keluarga inti, terutama oleh orangtua mempelai yang membuat biaya pernikahan menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan pernikahan yang dibiayai oleh mempelai saja. Namun umumnya biaya pernikahan yang ditanggung orangtua lebih rendah nominalnya bila dibandingkan dengan pernikahan yang dibiayai secara kolektif dalam satu komunitas.

# **Kelompok Potensial**

Keempat faktor yang memengaruhi biaya pernikahan dapat disandingkan untuk menyusun kategorisasi kelompok-kelompok masyarakat dalam konteks pelaksanaan pernikahan. Paling

tidak ada empat kelompok besar yang mewakili kombinasi diantara keempat faktor yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya.

Tabel 3. Kategorisasi Kelompok Masyarakat

Kelompok	Pendapatan	Prestise Sosial	Ritual Adat	Sumber Pembiayaan
Crazy-rich	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Ritual-addict	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi
Private-party	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
Young and Simple	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Dari kategorisasi dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok yang paling potensial membutuhkan dukungan finansial untuk memenuhi biaya pernikahan adalah kelompok "ritual-addict" yang memiliki ritual adat tinggi beiikut dengan sumber pembiayaannya meski pendapatan dan prestise sosialnya rendah. Selain itu kelompok "crazy-rich" juga berpotensi membutuhkan dukungan untuk melaksanakan kegiatan pernikahan. Kelompok "young and simple" bisa menjadi target produk perbankan yang lebih sederhana seperti tabungan.

## **Potensi Produk Perbankan**

Ada beberapa produk perbankan yang dapat dikembangkan untuk meraih kesempatan besar yang ada dalam kegiatan pernikahan. Beberapa orangtua mempelai mengaku bahwa mereka menjual aset yang mereka miliki untuk membiayai pernikahan anak laki-laki maupun anak perempuan mereka. Ini berarti ada banyak orangtua yang akan terbantu bila alih-alih menjual aset, mereka dapat menggunakan asetnya sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank. Kredit untuk kepentingan pernikahan bisa diberikan untuk kelompok masyarakat yang memiliki orientasi pada prestise sosial dan ritual yang tinggi walau tidak memiliki pendapatan yang tinggi maupun dukungan sosial yang kuat.

Dalam mengembangkan skemq kredit, ada banyak pihak dalam rantai nilai industri pernikahan yang dapat diajak bekerja sama. Wedding organizer yang sudah mulai menjamur di beberapa kota bisa menjadi salah satu mitra strategis untuk mengidentifikasi konsumen yang potensial membutuhkan dukungan finansial. Di tempat yang lebih rural seperti Tondano di Sulawesi Utara, bridal salon memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan wedding organizer di kota-kota besar. Sehingga, bekerjasama dengan bridal salon di daerah ini menjadi pilihan yang masuk akal.

Untuk pasangan muda yang bercita-cita membiayai pernikahannya secara mandiri, produk keuangan berupa tabungan bisa menjadi sebuah pilihan yang manarik. Bank dapat menawarkan bonus bagi pasangan yang memiliki program menikah dengan desain yang kurang lebih sama seperti tabungan haji.

Bagi kelompok masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, pernikahan menjadi sebuah kegiatan kolektif, maka perbankan barangkali tidak bisa memberikan produk beruba tabungan/kredit kepada pasangan atau orangtua secara langsung karena ini akan merusak tatanan sosial yang sudah lama ada di masyarakat. Namun, perbankan bisa mengidentifikasi aset-aset komunitas yang memiliki peran penting dalam upacara pernikahan di komunitas tersebut. Misalnya di Sumba, ternak merupakan aset yang sangat dibutuhkan dalam setiap prosesi pernikahan. Setiap anggota suku harus menyumbangkan ternaknya bagi setiap upacara pernikahan yang melibatkan sukunya. Maka, di sini perbankan bisa memberikan kredit ternak sebagai upaya untuk memastikan kepemilikan aset yang berkelanjutan bagi prosesi pernikahan di atas Sumba.

## Referensi

- Allerton, C. (2004). The path of marriage; Journeys and transformations in Manggarai, eastern Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 160*(2), 339-362. doi: 10.1163/22134379-90003730
- Fraser, J. (2011). Pop Song as Custom: Weddings, Ethnicity, and Entrepreneurs in West Sumatra. *Ethnomusicology*, *55*(2), 200. doi: 10.5406/ethnomusicology.55.2.0200
- Nilan, P. (2008). Youth transitions to urban, middle-class marriage in Indonesia: faith, family and finances. *Journal of Youth Studies*, *11*(1), 65-82. doi: 10.1080/13676260701690402
- Roibin, R. (2015). Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI), 15*(1), 34. doi: 10.18860/el.v15i1.2671
- Schrauwers, A. (2000). Three weddings and a performance: marriage, households, and development in the highlands of Central Sulawesi, Indonesia. *American Ethnologist, 27*(4), 855-876. doi: 10.1525/ae.2000.27.4.855

# **Lampiran 1. Instrumen Penelitian**

#### Tujuan

Mencari potensi pernikahan bisa masuk dalam skema kredit.

Ada dua variable besar yang harus dicari/dipetakan pengaruhnya terhadap besaran biaya, proses, dan pihak-pihak dalam pernikahan: institusi dan demografi.

- a. Institusi
  - i. Negara
  - ii. Agama
  - iii. Adat
- b. Demografi
  - i. Kelas Sosial
  - ii. Usia

#### Institusi

Ada dua hal yang harus ditanyakan:

- 1. Biaya
  - a. Post. Pada post mana saja biaya dikeluarkan, seperti catering/makan, gedung/tenda-kursi, dekorasi, upacara adat/agama, administrasi negara, mahar/panai, dll
  - b. Proporsi. Mana yang lebih besar dan persentasenya dari total spending, dan kenapa?
  - c. Source. Darimana dana pernikahan didapatkan, misalnya apakah dari sanak keluarga, tabungan pribadi, pinjaman, dll?
  - d. Pembagian Pendanaan Laki-laki dan Perempuan.

### 2. Tahapan

- a. Proses. Proses/tahapan apa saja yang dilalui dan bagaimana, proses penentuan besaran mahar
- b. Durasi. Durasi kegiatan pada setiap proses/tahapan
- c. Momentum. Kapan waktu terbaik menyelenggarakan pernikahan

### Demografi Pengantin/Orang Tua

- 1. Target responden usia:
  - a. usia matang (>30<sup>th</sup>) dan usia muda (<30<sup>th</sup>).
- 2. Target reponden kelas:
  - a. Pendidikan: rendah (kurang dari 12 tahun), tinggi (perguruan tinggi)
  - b. Pendapatan: rendah (dibawah UMR), atas (di atas UMR)

#### Target Responden/Data

- 1. Negara: KUA, Dukcapil
  - a. Data Orang Menikah dalam satu tahun terakhir
  - b. Data Orang Rencana menikah satu bulan kedepan

- 2. Agama: Tokoh Agama
  - a. Tanggal/Waktu nikah
  - b. Mahar pernikahan
- 3. Adat: Tokoh Adat
  - a. Tahapan pernikahan dan prosesnya
  - b. Pihak-pihak yang terlibat
  - c. Upacara-upacara pernikahan
  - d. Barang/jasa kebutuhannya
- 4. Suami-istri/Calon Mempelai dan Orang Tua
  - a. Mahar: besaran, bentuk, dan negosiasinya
  - b. Proporsi biasa
  - c. Post alokasi dana
  - d. Pembagian Dana antara Mempelai dan Orang Tua
  - e. Source pendanaan
- 5. Tokoh Masyarakat
  - a. Post alokasi
  - b. Tahapan dan proses
- 6. Wedding Organizer
  - a. Tahapan dan proses
  - b. Besar dana setiap tahapan
  - c. Jasa dan barang

# **Lampiran 2. Matriks Variabel Penelitian**

Variabel	Varian	Dimensi	Deskripsi
Insitusi/Isu:	Biaya	Post alokasi	Pada post mana saja biaya dikeluarkan,
Negara			seperti catering/makan, gedung/tenda-
Agama			kursi, dekorasi, upacara adat/agama,
Adat			administrasi negara, mahar/panai, dll
		Proporsi	Mana yang lebih besar dan persentasenya
			dari total spending, dan kenapa?
		Source	Darimana dana pernikahan didapatkan,
			misalnya apakah dari sanak keluarga,
			tabungan pribadi, pinjaman, dll?
		Pembagian	Pembagian Pendanaan Laki-laki dan
		Dana	Perempuan
	Tahapan/ Proses	Proses	Proses/tahapan apa saja yang dilalui dan
			bagaimana, proses penentuan besaran
			mahar
		Durasi	Durasi kegiatan pada setiap
			proses/tahapan
		Momentum	Kapan waktu terbaik menyelenggarakan
			pernikahan

# Lampiran 3. Poster Hasil Riset Pernikahan







